



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 79/KEP/BPP/2023

T E N T A N G

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Peta Rencana SPBE ini bersifat terbuka untuk direview, dievaluasi, dan dikembangkan setiap tahun menyesuaikan perkembangan terkini.
- KEDUA : Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut:
1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;
 2. Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
 3. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
 4. Penentuan Program dan Kegiatan. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis.

- KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
dan
3. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 79/KEP/BPP/2023
TANGGAL 14 September 2023
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Era keterbukaan informasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap konsep pengelolaan pemerintahan. Kemudahan mendapatkan informasi telah mempercepat pembentukan pola baru hubungan pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat menjadi lebih kritis dan antisipatif terhadap segala perkembangan khususnya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dilingkungannya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat harus diantisipasi oleh penyelenggara pemerintahan sehingga terjalin sinergitas antara penyelenggaraan pemerintahan yang modern dengan peningkatan kualitas kehidupan dan intelektualitas masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang modern erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam segala aspek yang akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal inilah yang sekarang disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang

mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan *e-government*.

Kebijakan pengembangan SPBE diinisiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan tersebut memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada Instansi Pusat mencapai nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan Pemerintah Daerah mencapai nilai indeks 2,5 (kurang). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional.

Merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, posisi *e-Government* pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam proses tahap 3 (tiga) yakni pemantapan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tentunya akan segera mengembangkan *e-Government*nya ke tahapan yang lebih tinggi ke tahap 4 (empat)

yakni pemanfaatan.

Disisi lain, berdasarkan hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) , Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah mengikuti PeGI sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berada pada peringkat 14 dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan Indeks 1, 41 (Kurang) dengan Skala 5, Pada penilaian tahun 2021, Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan yang signifikan dengan perolehan 2, 6 (Baik) dan peringkat ke 3 dari 17 Kabupaten Kota di Sumatera Barat, pada tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tetap dengan Perolehan 2,60 (Baik) namun turun secara peringkat di Sumatera Barat . Terlihat dari hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih berada diposisi belum maksimal. Sehingga perlu upaya terencana dan terukur untuk mewujudkan penerapan SPBE yang ideal.

Menyadari akan pentingnya peranan SPBE dalam tata kelola pemerintahan ini perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan SPBE akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan investasi yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan adanya perencanaan yang baik, penerapan SPBE diharapkan akan dapat mendapatkan hasil optimal, sehingga biaya yang dikeluarkan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu menyusun **Peta Rencana SPBE** untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan

terpercaya. Dokumen Peta Rencana SPBE ini bersifat terbuka untuk direview, dievaluasi, dan dikembangkan setiap tahun menyesuaikan perkembangan terkini.

1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan Peta Rencana SPBE adalah memberikan gambaran kondisi pelaksanaan pemerintah saat ini dan arahan dalam membangun, mengimplementasikan dan mengembangkan SPBE jangka panjang agar efektif dan efisien dalam mendukung pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menuju *good governance*.

Tujuan penyusunan Rencana Induk SPBE ini adalah :

Meningkatkan mutu layanan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas dan terpercaya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

1. Memperbaiki organisasi, sistem manajemen, dan sistem kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman .
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, terpadu dan terintegrasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun manfaat dari penyusunan Rencana Induk SPBE ini adalah menjadi dasar dan memberikan arah dalam pengembangan SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk jangka panjang serta memberikan andil dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meliputi Tata Kelola dan Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE dan Sumber Daya Manusia SPBE.

1.4. Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

VISI

“PADANG PARIAMAN BERJAYA”.

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Unggul **Berkelanjutan**” memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. “**Religius**” adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma- norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. “**SeJAhtera**” merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan social budaya.
4. “**BerbudaYA**” merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.;

MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana public secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang.

3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sector primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sector pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.

Bab 2 Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan

SPBE Pemerintah Daerah melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu. Penyusunan Peta Rencana SPBE sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 18 tahun 2022 tentang “Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE”.

2.1 Keterkaitan Peta Rencana SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Menurut SE Kemenpan RB No. 18 tahun 2022 tersebut, Peta Rencana SPBE dikelompokkan menjadi:

- 1) Peta Rencana SPBE Nasional, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE yang diterapkan secara nasional sebagai panduan bagi IPPD dalam menyusun Peta Rencana SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Instansi Pusat. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Rencana Strategis Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1 Substansi Peta Rencana SPBE

Substansi Peta Rencana SPBE terdiri dari:

- 1) Sasaran program/kegiatan, merupakan Sasaran Program/Kegiatan dari dokumen Strategis Instansi Pusat yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Inisiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital;
- 3) Muatan peta rencana, yang terdiri dari 7 muatan yaitu:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan;
 - d. Aplikasi;
 - e. Infrastruktur TIK;
 - f. Keamanan;
 - g. Audit TIK.
- 4) Program, merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis.
- 5) Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan

2.2 Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE

Dalam rangka menyusun Peta Rencana SPBE, perlu ditetapkan metodologi untuk

memandu proses penyusunan Peta Rencana SPBE tersebut. Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut:

5. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;
6. Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
7. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
8. Penentuan Program dan Kegiatan. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis

Sasaran Program/Kegiatan bersumber dari Dokumen Strategis IPPD yang dapat didukung dari realisasi Arsitektur SPBE melalui Inisiatif Strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE.

Tabel 2.1. Ilustrasi Peta Rencana SPBE

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)					
Indikator	(Indikator)			(Target)	(Target)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)					
1 Tata Kelola					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
B	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
2 Manajemen					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
3 Layanan					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
4 Aplikasi					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
5 Infrastruktur					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
6 Keamanan					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
7 Audit TIK					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)					
1 Tata Kelola					
...					
7 Audit TIK					
...					

Dokumen strategis yang diacu adalah Renstra bagi Instansi Pusat dan RPJMD bagi Pemerintah Daerah. Penentuan ini mencakup Indikator serta Target yang telah direncanakan pada Dokumen Strategis. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada dokumen strategis yang diacu. Jumlah indikator yang diisikan tidak dibatasi hanya 1 (satu) indikator saja, sebagaimana terlihat pada ilustrasi Tabel 2.1 di atas.

2.2.1 Pengkategorian Sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE

Inisiatif Strategis merupakan Inisiatif strategis yang terdapat di Arsitektur SPBE IPPD sesuai dengan tematik layanan digital. Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE IPPD, Inisiatif Strategis memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) di mana setiap Inisiatif Strategis memiliki 7 (tujuh) muatan SPBE. Sehingga, jika pada dokumen ini terdapat lebih dari 1 (satu) inisiatif strategis, maka terdapat muatan sejumlah inisiatif strategis dikali dengan 7 (tujuh) muatan peta rencana SPBE.

2.2.2 Pengkategorian Sesuai Muatan Peta Rencana SPBE

Muatan Peta Rencana SPBE yang selanjutnya disusun adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata Kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi;
2. Manajemen SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres SPBE;
3. Layanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan

seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan, transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik;

4. Aplikasi, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi;
5. Infrastruktur TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur;
6. Keamanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan;
7. Audit TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK

2.2.3 Penyusunan Program dan Kegiatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres SPBE, Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE nasional. Dalam melakukan pemilihan program/kegiatan SPBE yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam hingga Tahun 2026, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Efektivitas program;
2. Kelayakan program; dan
3. Efisiensi program

2.2.4 Efektivitas Program

Kriteria ini menilai dampak program/kegiatan yang diharapkan. Dampak dalam hal ini dinilai dari perspektif kualitatif dan kuantitatif. Penilaian efektivitas program memerlukan perbandingan satu program dengan program lain dalam kategori yang sama karena sifat dampak yang diharapkan berbeda dari satu kategori ke kategori lainnya. Sebagai contoh: Layanan elektronik harus dinilai dari seberapa besar kontribusinya untuk mencapai tujuan strategis SPBE. Layanan bersama harus dinilai berdasarkan potensi jumlah layanan elektronik yang akan menggunakan layanan bersama.

Skala efektivitas program ditentukan pada tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu:

1. Program wajib untuk kesuksesan penerapan SPBE; akan berpengaruh besar pada keberhasilan program lainnya; atau akan berpengaruh besar pada bagaimana pemerintah menjalankan bisnis pemerintahan (yaitu, berdampak pada reformasi sektor publik).
2. Program memiliki dampak nyata tetapi tidak wajib untuk kesuksesan SPBE; atau tidak ada program prioritas tinggi yang bergantung pada keberhasilan atau penyelesaian program ini.
3. Dampak program tidak terlihat pada pencapaian strategi SPBE secara umum; harapan penyerapan untuk hasil program rendah.

2.2.5 Kelayakan Program

Kelayakan program memperkirakan tingkat kemungkinan keberhasilan dalam melaksanakan suatu program. Faktor yang harus

dipertimbangkan meliputi:

1. Ketergantungan pada program lain untuk penyelesaiannya.
2. Kemampuan untuk memenuhi faktor sukses kritis untuk program tersebut.
3. Tingkat dan pengelolaan risiko.
4. Kesiapan untuk melaksanakan proyek secara penuh.
5. Potensi manfaat dan potensi ekonomi yang dihasilkan.
6. Tingkat kesadaran dan dukungan pemangku kepentingan.

Skala kelayakan program ditentukan dalam tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu:

1. Tidak ada risiko atau tantangan besar yang dirasakan; prasyarat terpenuhi dan tersedia; "Dukungan" dari aktor terkait sudah ada; ketergantungan ada pada pemangku kepentingan yang menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai.
2. Tantangan teknis diantisipasi; ketergantungan dan prasyarat pada sumber eksternal ada; atau risiko tinggi yang dihadapi proyek diantisipasi.
3. Tantangan teknis utama diantisipasi; prasyarat sulit dipecahkan; ketergantungan tinggi pada berbagai pemangku kepentingan; atau pemangku kepentingan yang terlibat menunjukkan tingkat kesiapan yang tidak memadai.

2.2.6 Efisiensi Program

Efisiensi program dinilai terutama dengan menggunakan kriteria/faktor-faktor berikut:

1. Biaya program (yang harus menerapkan metodologi penghitungan biaya penuh)

2. Durasi program.

Meskipun efektivitas adalah faktor yang paling penting dalam menentukan program yang dipilih, kriteria kelayakan dan efisiensi program diharapkan akan menghasilkan prioritas yang lebih realistis, terutama di antara program-program dengan peringkat efektivitas yang serupa. Misalnya, apabila terdapat dua program yang memiliki tingkat kepentingan yang sama (memiliki peringkat efektivitas yang sama), maka faktor kelayakan dan efisiensi akan menentukan suatu program memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program yang lain. Selain itu beberapa faktor lain juga menentukan dalam pemilihan program/kegiatan SPBE, sebagaimana ilustrasi pada Gambar 2.1. berikut ini.



Gambar 2.1. Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan

2.2.7 Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

Setelah memilih program/kegiatan SPBE yang sesuai dengan kriteria, program/kegiatan tersebut kemudian disusun secara hierarki berdasarkan tiga tingkatan yang berbeda. Tingkat pertama mewakili tujuh muatan yang diamanatkan dalam Perpres SPBE. Tingkat kedua merupakan sasaran strategis yang juga diamanatkan dalam Perpres yang sama. Tingkat ketiga menyajikan program/kegiatan rinci yang akan dikembangkan oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah berdasarkan RPJMN dan peraturan terkait lainnya. Ilustrasi yang terlihat pada Tabel 2.2. menggambarkan penyajian program/kegiatan SPBE nasional dalam Peta Rencana SPBE Nasional.

Tabel 2.2. Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

No	Proyek/Kegiatan	UIC	Output	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tata Kelola	Level 1						
1.1.	Pembangunan Arsitektur	Level 2						
1.1.1	Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Level 3						
2.	Manajemen							
3.	Layanan							
4.	Aplikasi							
5.	Infrastruktur							
6.	Keamanan SPBE							
7.	Audit TIK							
7.1	Audit Aplikasi							
7.1.1	Audit Aplikasi Khusus							
7.1.2	Audit Aplikasi Umum	Level 3						
7.2	Audit Infrastruktur							
7.3	Audit Keamanan							

Muatan Peta Rencana SPBE Nasional Sesuai Amanat Perpres 95/2018 (7 muatan)

Diisi menggunakan referensi inisiatif strategis SPBE dalam rencana induk SPBE, komponen pada Arsitektur SPBE, dan peran yang dimiliki oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional

Merupakan proyek/kegiatan yang perlu diisi oleh *leading sector* Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terkait dengan SPBE, dengan memastikan terpenuhi semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE) dalam

Referensi rencana kerja yang ditentukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang menjadi acuan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun turunan dari Peta Rencana SPBE Nasional, dengan tetap memastikan terpenuhi didalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE)

2.2.8 Pemantauan dan Evaluasi Program

Dari seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam Peta Rencana SPBE nasional, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan oleh Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional melalui Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional

Bab 3 Peta Rencana SPBE 2023 - 2027

Peta Rencana SPBE Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022-2026 berisikan langkah-langkah yang akan di jalankan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE untuk 5 tahun mendatang. Peta Rencana ini digunakan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Padang Pariaman .

Peta Rencana SPBE Kabupaten Padang Pariaman ini dibuat dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten Padang Pariaman dan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025 serta untuk mewujudkan Visi SPBE Kabupaten Padang Pariaman yaitu “Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk menciptakan pelayanan publik yang berkinerja tinggi dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat”. Peta Rencana SPBE berikut ini memuat:

1. Peta Rencana Tata Kelola SPBE
2. Peta Rencana Manajemen SPBE
3. Peta Rencana Layanan SPBE
4. Peta Rencana Infrastruktur SPBE
5. Peta Rencana Aplikasi SPBE
6. Peta Rencana Keamanan SPBE
7. Peta Rencana Audit TIK

Penerapan SPBE di Kabupaten Padang Pariaman yang dijalankan oleh Tim Koordinasi SPBE harus secara konsisten menjalankan program-program sesuai dengan Peta Rencana

yang ada. Reviu Peta Rencana SPBE Kabupaten Padang Pariaman dapat dilakukan jika ada perubahan Arsitektur SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemkab Padang Pariaman atau berdasarkan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemkab Padang Pariaman . Peta Rencana SPBE Kabupaten Padang Pariaman(tata kelola, manajemen SPBE, layanan, infrastruktur, aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan Audit TIK) dijelaskan secara detail pada halaman berikut ini:

3.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Tabel 3.1. Peta Rencana SPBE untuk muatan Tata Kelola SPBE

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:									
Indikator									
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN PADANG PARIAMAN									
1	Tata Kelola								
1.1.	Pembangunan Arsitektur SPBE								
1.1.1.	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Padang Pariaman	Arsitektur SPBE belum Sesuai					
1.1.2.	Penyusunan Arsitektur Layanan	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	Dokumen Arsitektur Layanan	Arsitektur Layanan belum Sesuai					
1.1.3.	Penyusunan Arsitektur Data	Dinas Kominfo	Dokumen Arsitektur Data	Arsitektur Data belum Sesuai					
1.1.5.	Penyusunan Arsitektur Infrastruktur	Dinas Kominfo	Dokumen Arsitektur Infrastruktur	Arsitektur infrastruktur belum Sesuai					

1.1.6.	Penyusunan Arsitektur Keamanan	Dinas Kominfo	Dokumen Arsitektur Keamanan	Aristektur Keamanan belum Sesuai				
1.1.4.	Penyusunan Arsitektur Aplikasi	Dinas Kominfo	Dokumen Arsitektur Aplikasi	Arsitektur Aplikasi belum Sesuai				
1.1.7.	Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Dinas Kominfo	Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Portal Arsitektur SPBE				
1.1.8.	Integrasi Pusat Data Kabupaten Padang Pariaman dengan Pusat Data Pemprov Sumatera Barat	Dinas Kominfo	Pusat Data sudah terintegrasi	Integrasi Pusat Data belum Sesuai				
1.1.9.	Integrasi Pusat Data Kabupaten Padang Pariaman dengan Pusat Data Nasional	Dinas Kominfo	Pusat Data sudah terintegrasi	Integrasi Pusat Data belum ada				
1.1.10.	Penambahan kapasitas storage untuk Backup & Recovery pada Pusat Data	Dinas Kominfo	Back up dan recovery pusat data sudah siap	Penambahan kapasitas storage pusat data belum dilakukan				

1.1.1 1.	Peningkatan Quality of Service Jaringan Intra Pemkab Padang Pariaman	Dinas Kominfo	Kualitas layanan jaringan Intra Pemkab Padang Pariaman bagus	Q of S Jaringan Intra Pemkab Padang Pariaman masih perlu ditingkatkan				
1.1.12.	Forum Kolaborasi SPBE antara Pemkab Padang Pariaman dengan Kampus, , Pegiat TIK, dan komunitas lainnya	Diskominfo	Forum kolaborasi SPBE terbentuk	Forum kolaborasi SPBE sudah dilakukan				
1.2.	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Padang Pariaman							
1.2.1	Evaluasi kinerja dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE	Sekretariat Daerah	Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE	Evaluasi kinerja tim koordinasi SPBE sudah dilakukan				
1.3.	Penyusunan Kebijakan SPBE							
1.3.1.	Revisi Peraturan Bupati Padang	Sekda	Peraturan Daerah Padang Pariaman	Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21				

	Pariaman Nomor 21 tahun 2020 terkait penerapan SPBE		yang telah direvisi terkait penerapan SPBE	tahun 2020 terkait penerapan SPBE belum direvisi				
1.3.2.	Penyusunan dan pembaharuan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinas Kominfo	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan pembangunan aplikasi SPBE belum disusun				
1.3.3.	Penyusunan dan pembaharuan Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK	Dinas Kominfo	Peraturan standarisasi infrastruktur jaringan TIK sudah terbit dan mutakhir	Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK belum ada				
1.3.4.	Penyusunan dan pembaharuan kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Government Service Bus)	Dinas Kominfo	Peraturan terkait sistem penghubung layanan sudah terbit dan mutakhir	Kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Government Service Bus) belum ada				
1.3.5.	Penyusunan Peta Rencana SPBE	Dinas Kominfo	Dokumen Peta Rencana SPBE	Peta rencana dalam proses penyusunan				

1.3.6.	Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	Bappeda dan BPKAD	Rencana dan Anggaran SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE sudah disusun				
1.3.7.	Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Pemkab Padang Pariaman	Dinas Kominfo	Kebijakan Jaringan Intra Pemkab Padang Pariaman	Kebijakan Jaringan Intra Pemkab Padang Pariaman belum disusun				
1.4.	Penyusunan SOP untuk penerapan kebijakan SPBE							
1.4.1.	Pembaruan Proses Bisnis SPBE untuk semua OPD	Dinas Kominfo	Proses bisnis SPBE menjadi mutakhir	Proses Bisnis SPBE belum diperbarui untuk untuk semua OPD				
1.4.2.	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data	Dinas Kominfo	SOP Pengoperasian Layanan Pusat Data	Prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data belum ada				

3.2 Peta Rencana Manajemen SPBE

Tabel 3.2. Peta Rencana SPBE untuk muatan Manajemen SPBE

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:									
Indikator									
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN PADANG PARIAMAN									
2	Manajemen SPBE								
2.1.	Manajemen Risiko		Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE						

1.2.	Pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh OPD	Inspektorat	Manajemen resiko telah diterapkan, dievaluasi dan diperbaiki	Pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh OPD				
2.1.3.	Identifikasi Resiko SPBE	Inspektorat	Resiko SPBE telah teridentifikasi	Resiko SPBE belum teridentifikasi				
2.1.4.	Analisis level Resiko SPBE	Inspektorat	Level resiko telah diidentifikasi dan dianalisis	Analisis level resiko belum teridentifikasi				
2.1.5.	Evaluasi Resiko SPBE	Inspektorat	Resiko SPBE telah dievaluasi	Evaluasi resiko SPBE belum dilakukan				
2.1.6.	Melakukan Inventarisasi Informasi Umum dari semua Unit Pemilik Resiko (UPR) SPBE, tugas UPR SPBE, fungsi UPR SPBE, dan periode waktu pelaksanaan Manajemen Resiko.	Inspektorat	Informasi umum dari semua UPR, seperti tugas, fungsi, dan periode waktu pelaksanaan telah diinventarisasi	Inventarisasi belum dilakukan				
2.1.8.	Penetapan Struktur Pelaksana Manajemen Resiko.	Inspektorat	Struktur pelaksana Manajemen Resiko telah ditetapkan	Struktur pelaksana manajemen				
2.1.9.	Membuat Daftar Pemangku Kepentingan	Inspektorat	Daftar Pemangku Kepentingan telah dibuat	Daftar pemangku kepentingan belum dibuat				

2.1.7.	Penetapan Sasaran UPR	Inspektorat	Sasaran UPR telah ditetapkan	Sasaran UPR belum ditetapkan				
2.1.10	Penetapan Kategori Resiko SPBE.	Inspektorat	Kategori resiko SPBE telah ditetapkan	Kategori resiko belum ditetapkan				
2.1.12	Melakukan penanganan / perbaikan dalam penentuan Konteks Resiko, Sasaran UPR dan Kategori Resiko SPBE.	Inspektorat	Konteks resiko, sasaran UPR serta kategori resiko SPBE telah ditangani dan diperbaiki	Konteks resiko, sasaran UPR, dan kategori resiko SPBE belum ditentukan				
2.2.	Manajemen Keamanan Informasi		Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan					

			berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.					
2.2.1	Penyusunan draft dan Pembaharuan Pedoman/Standar Keamanan Informasi	Diskominfo	Pedoman Keamanan Informasi yang sudah jadi dan terbaharui	Draft pedoman standar keamanan informasi sudah disusun				
2.2.2	Penetapan ruang lingkup Keamanan Informasi.	Diskominfo	Ruang lingkup keamanan informasi sudah ditetapkan	Ruang lingkup keamanan informasi				
2.2.3.	Penetapan penanggung jawab keamanan di seluruh unit kerja SPBE Kabupaten Padang Pariaman	Diskominfo	Penanggung jawab keamanan di seluruh unit kerja SPBE telah ditetapkan	Penanggung jawab keamanan di seluruh unit kerja SPBE belum ditetapkan				
2.2.4.	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE di seluruh unit kerja.	Diskominfo	Edukasi kesadaran keamanan SPBE di seluruh unit kerja telah dilakukan	Edukasi kesadaran keamanan SPBE sudah dilakukan tetapi belum di seluruh unit kerja				
2.2.5.	Penilaian kerentanan Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Diskominfo	Penilaian kerentanan Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Tingkat kerentanan keamanan				

				SPBE belum dinilai untuk seluruh unit kerja				
2.2.6.	Inventarisasi seluruh aset SPBE yang meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur	Diskominfo	Daftar inventarisasi aset SPBE	Inventarissi seluruh aset SPBE belum dilakukan				
2.2.7.	Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE	Diskominfo	Tingkat Kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE	Identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE belum dilakukan				
2.2.8.	Mengukur tingkat resiko Keamanan SPBE	Diskominfo	Tingkat resiko keamanan SPBE	Tingkat resiko keamanan SPBE belum diukur				
2.2.9.	Penanganan insiden Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Diskominfo	Insiden keamanan SPBE telah ditangani	Insiden keamanan SPBE sudah dilakukan				
2.2.10.	Mengidentifikasi sumber serangan;	Diskominfo	Sumber serangan telah teridentifikasi	Identifikasi sumber serangan belum dilakukan secara menyeluruh di semua unit				

				kerja				
2.2.11.	Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya	Diskominfo	Informasi insiden sudah dianalisis	Analisis informasi yang terkait dengan insiden belum dilakukan				
2.2.12.	Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi	Diskominfo	Penanganan insiden sudah dilakukan sesuai prioritas	Prioritas penanganan insiden belum dilakukan				
2.2.13.	Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi	Diskominfo	Bukti insiden telah didokumentasikan	Dokumentasi bukti insiden sudah dilakukan				
2.2.14.	Memitigasi atau mengurangi dampak resiko Keamanan SPBE	Diskominfo	Dampak resiko keamanan SPBE telah dimitigasi dan dikurangi	Mitigasi atau pengurangan dampak resiko keamanan SPBE sudah dilakukan				
2.3.	Manajemen Data		Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,					

			dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data					
2.3.1.	Penyusunan draft dan Pembaharuan Pedoman Manajemen Data	Diskominfo	Penyusunan dan pembaharuan pedoman manajemen data telah dilakukan	Draft pedoman manajemen data sudah disusun				
2.3.2.	Menyusun serta reuiu arsitektur data, spesifikasi data dan ketentuan data	Diskominfo	arsitektur data, spesifikasi data dan ketentuan data sudah disusun dan direviu	Arsitektur data, spesifikasi dan ketentuan data belum disusun dan direviu.				
2.3.3.	Penyusunan, penetapan, perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pembaruan data induk dan data referensi	Diskominfo	Data induk dan data referensi sudah disusun, ditetapkan, direncanakan, dikumpulkan, diperiksa, disebarluaskan dan diperbarui	Data induk dan data referensi belum disusun				
2.3.4.	Perencanaan spesifikasi kualitas data yang sesuai forum satu data Indonesia	Diskominfo	Spesifikasi kualitas data yang sesuai dengan forum satu data Indonesia sudah direncanakan	Perencanaan spesifikasi kualitas data yang sesuai forum satu data				

				Indonesia belum dilakukan				
2.3.5.	Penyusunan Basis Data	Diskominfo	Basis data telah disusun	Penyusunan Basis Data belum dilakukan				
2.3.6.	Mengembangkan Padang Pariaman Satu Data	Diskominfo	Padang Pariaman satu data telah dikembangkan	Padang Pariaman Satu Data belum dikembangkan				
2.3.7.	Evaluasi Manajemen Data	Diskominfo	Manajemen data telah dievaluasi	Evaluasi Manajemen Data sudah dikembangkan				
2.4.	Manajemen Aset TIK		Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat					

			lunak yang digunakan dalam SPBE.					
2.4.1.	Penyusunan draft dan pembaharuan dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD)	Pedoman pelaksanaan manajemen aset TIK telah disusun dan diperbaharui	Draft pedoman Manajemen aset TIK sudah disusun				
2.4.2.	Perencanaan aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD)	Aset TIK telah direncanakan	Perencanaan aset TIK belum dilakukan				
2.4.3	Penerapan Manajemen Aset TIK beserta evaluasinya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD)	Manajemen aset TIK dan evaluasinya telah diterapkan	Penerapan Manajemen Aset TIK belum dilakukan dan belum dievaluasi				
2.4.4.	Pengadaan aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD)	Aset TIK telah dilakukan pengadaan	Pengadaan aset TIK sudah dilakukan				
2.4.5.	Pengelolaan aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD)	Aset TIK telah dilakukan pengelolaan	Pengelolaan aset TIK sudah dilakukan				
2.4.6.	Penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD)	Perangkat keras dan perangkat lunak SPBE telah dilakukan penghapusan	Penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak SPBE				

				belum dilakukan				
2.5.	Manajemen Sumber Daya Manusia		Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE					
2.5.1.	Penyusunan dan Pembaharuan Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen SDM SPBE	Badan Kepegawaian dan SDM	edukasi kesadaran keamanan SPBE di seluruh unit kerja telah dilakukan	Dokumen pedoman pelaksanaan				

		(BKSDM)		Manajemen SDM SPBE belum disusun				
2.5.2.	Penyusunan matriks kompetensi SDM SPBE eksisting dan kebutuhannya	Badan Kepegawaian dan SDM (BKSDM)	Matriks kompetensi SDM SPBE eksisting dan kebutuhannya telah disusun	Penyusunan matriks kompetensi SDM SPBE eksisting dan kebutuhannya belum dilakukan				
2.5.3.	Penerapan dan evaluasi Manajemen SDM SPBE	Badan Kepegawaian dan SDM (BKSDM)	Manajemen SDM SPBE telah diterapkan dan dievaluasi	Penerapan dan evaluasi Manajemen SDM SPBE sudah dilakukan				
2.6.	Manajemen Pengetahuan		Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih					

			pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.					
2.6.1.	Penyediaan draft dan pembaharuan Pedoman Manajemen Pengetahuan Kabupaten Padang Pariaman	Diskominfo	Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan sudah disahkan	Draft Pedoman Manajemen Pengetahuan sudah disusun				
2.6.2.	Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di semua OPD beserta evaluasinya	Diskominfo	Manajemen Pengetahuan SPBE telah diterapkan di semua OPD dan dievaluasi	Penerapan Manajemen Pengetahuan SPB beserta evaluasinya belum dilakukan di semua OPD				
2.6.3.	Pelaksanaan knowledge sharing SPBE melalui berbagai forum	Diskominfo	Forum knowledge sharing telah dilaksanakan	Pelaksanaan knowledge sharing SPBE melalui berbagai forum sudah dilakukan				
2.6.4.	Pembentukan tim Koordinasi Manajemen Pengetahuan	Diskominfo	Tim koordinasi manajemen pengetahuan telah dibentuk	Tim Koordinasi Manajemen Pengetahuan belum dilakukan				

2.6.5.	Mengidentifikasi konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi	Diskominfo	Konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi telah diidentifikasi	Konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi belum diidentifikasi				
2.6.6.	Mengidentifikasi praktek manajemen pengetahuan dalam organisasi	Diskominfo	Praktek manajemen pengetahuan telah diidentifikasi	Praktek manajemen pengetahuan dalam organisasi belum diidentifikasi				
2.6.7.	Mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap para pemangku kepentingan	Diskominfo	Analisis terhadap pemangku kepentingan telah diidentifikasi dan dilakukan	Analisis terhadap para pemangku kepentingan belum dilakukan				
2.6.8.	Merumuskan strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan	Diskominfo	Strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan telah dirumuskan	Strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan belum dirumuskan				

2.6.9.	Mengembangkan strategi implementasi manajemen pengetahuan	Diskominfo	Strategi implementasi manajemen pengetahuan telah dikembangkan	Strategi implementasi manajemen pengetahuan belum dikembangkan				
2.6.10.	Pengembangan dan Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan (SMP) Padang Pariaman	Diskominfo	Sistem Manajemen Pengetahuan Padang Pariaman telah dikembangkan dan diimplementasikan	Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan (SMP) Padang Pariaman belum dilakukan				
2.6.11.	Pemanfaatan dan Integrasi SMP Padang Pariaman dengan aplikasi SIMP@N BPPT	Diskominfo	SMP Padang Pariaman telah diintegrasikan dengan aplikasi SIMP@N BPPT	Integrasi SMP Padang Pariaman dengan aplikasi SIMP@N BPPT belum				
2.6.12.	Monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE Kabupaten Padang Pariaman	Diskominfo	Manajemen Pengetahuan SPBE Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan	Monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE sudah dilakukan				

2.7.	Manajemen Perubahan		Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.					
2.7.1.	Penyusunan draft dan pembaharuan Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Padang Pariaman	Diskominfo	Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Perubahan telah disusun dan diperbaharui secara berkala	Draft Pedoman Manajemen Perubahan SPBE sudah disusun				
2.7.2.	Penerapan Strategi Manajemen Perubahan SPBE ke seluruh OPD	Diskominfo	Strategi manajemen perubahan SPBE ke seluruh OPD telah diterapkan	Strategi Manajemen Perubahan SPBE belum diterapkan ke seluruh OPD				

2.7.3.	Penyusunan Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan	Diskominfo	Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan telah disusun	Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan belum disusun				
2.7.4.	Pengembangan Sistem Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Padang Pariaman	Diskominfo	Sistem Manajemen Perubahan SPBE telah dikembangkan	Sistem Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Padang Pariaman belum dikembangkan				
2.7.5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Padang Pariaman	Diskominfo	Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan monitoring dan dievaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Padang Pariaman belum dilakukan				
2.7.6.	Penerapan Strategi Manajemen Perubahan SPBE ke seluruh OPD	Diskominfo	Strategi manajemen perubahan SPBE telah diterapkan	Penerapan Strategi Manajemen Perubahan				

				SPBE belum diterapkan ke seluruh OPD				
2.8.	Manajemen Layanan SPBE		<p>Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.</p> <p>Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.</p>					

2.8.1.	Penyusunan draft dan pembaharuan Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Padang Pariaman	Diskominfo	Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Layanan SPBE telah disusun dan diperbaharui	Draft Pedoman Manajemen Layanan SPBE sudah disusun				
2.8.2.	Penyusunan dan pembaharuan Proses Bisnis, SOP, dan SLA Manajemen Layanan	Diskominfo	Proses bisnis, SOP, dan SLA Manajemen layanan telah disusun dan diperbaharui	Proses Bisnis, SOP, dan SLA Manajemen Layanan belum disusun				
2.8.3.	Sosialisasi tentang Manajemen Layanan SPBE	Diskominfo	Manajemen layanan SPBE telah dilakukan sosialisasi	Sosialisasi tentang Manajemen Layanan SPBE tetapi belum ke seluruh unit kerja				
2.8.4.	Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE melalui Service Desk Tier 1 dan 2	Diskominfo	Infrastruktur dan aplikasi SPBE telah digunakan dan dilakukan pemeliharaan melalui service tier 1 dan 2	Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE belum dilakukan melalui Service Desk Tier 1 dan				

				2				
2.8.5.	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna melalui Service Desk Tier 1 dan 2	Diskominfo	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE telah dilakukan melalui service desk tier 1 dan 2	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna belum dilakukan melalui Service Desk Tier 1 dan 2				
2.8.6.	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Padang Pariaman	Diskominfo	Sistem aplikasi manajemen layanan SPBE telah dilakukan pengembangan	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Padang Pariaman Belum dilakukan				
2.8.7.	Reviu, Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Diskominfo	Manajemen layanan SPBE telah dilaksanakan, direviu, dievaluasi dan diperbaiki	Reviu, Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Manajemen				

				Layanan SPBE belum dilakukan				
2.8.8.	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan	Diskominfo	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan telah dilakukan	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan belum dilakukan				

Selanjutnya untuk muatan Manajemen diturunkan dalam peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk manajemen resiko, manajemen kamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE sebagai berikut.

3.a. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Manajemen Resiko

Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk manajemen resiko dalam 5 tahun kedepan disertai bukti dukung yang diperlukan ditunjukkan pada Tabel 3.3.

3.b. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Manajemen Keamanan Informasi

Selanjutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen keamanan informasi yang ditunjukkan pada Tabel 3.4 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.c. Peta Rencana Pemenuhan kriteria dan kondisi untuk Manajemen Data

Kemudian peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk manajemen data yang ditunjukkan pada Tabel 3.5 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.d. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Aset TIK

Selanjutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen asset TIK yang ditunjukkan pada Tabel 3.6 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.e. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Kompetensi SDM SPBE

Berikutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk kompetensi SDM SPBE yang ditunjukkan pada Tabel 3.7 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.f. Peta Rencana Pemenuhan Kompetensi SDM SPBE

Peta rencana selanjutnya adalah pemenuhan kriteria untuk kompetensi SDM SPBE yang ditunjukkan pada Tabel 3.8 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.g. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi untuk Manajemen Pengetahuan

Selanjutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen pengetahuan yang ditunjukkan pada Tabel 3.9 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlun

3.h. Peta Rencana Pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Perubahan SPBE

Berikutnya yaitu peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen perubahan SPBE yang ditunjukkan pada Tabel 3.10 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.i. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Manajemen Layanan

Peta rencana berikutnya yaitu pemenuhan kriteria untuk manajemen layanan yang ditunjukkan pada Tabel 3.11 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

Tabel 3.3. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Resiko

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah menerapkan kegiatan Manajemen Resiko SPBE tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.						
2	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menuangkan program dan kegiatan manajemen resiko ke dalam Peta Rencana SPBE serta menerapkannya walaupun belum mengacu pada pedoman						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi peta rencana yang memuat program dan kegiatan manajemen resiko SPBE; 2. Dokumentasi Penerapan manajemen resiko SPIP; 3. Dokumentasi Penerapan manajemenrisiko IPPD/lainnya.
3	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan Manajemen Resiko SPBE yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE 2. Dokmentasi pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE 3. Form 2.1-4.0 yang telah terisi yang terdapat pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2022 4. Sekurang-kurangnya IPPD

							dapat melampirkan tiga (3) form yaitu form penetapan konteks risiko SPBE, form penilaian risiko SPBE, dan form rencana penanganan risiko SPBE yang diformalkan oleh pemilik risiko, atau mengisi matriks risiko final
4	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki Kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE IPPD, serta diterapkan ke seluruh unit kerja /perangkat daerah dan melakukan reviu dan evaluasi						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang sudah ditetapkan oleh Koordinator SPBE IPPD 2. Form 2.1-5.0 yang telah terisi yang terdapat pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 3. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut 4. Undangan rapat/dokumentasi aktivitas reviu dan evaluasi (opsional) 5. SK Tm yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko (KMR), Unit Kepatuhan Risiko (UKR),

							<p>dan Unit Pemilik Risiko (UPR)</p> <p>6. Sekurang-kurangnya IPPD harus melampirkan empat (4) form yaitu form penetapan konteks risiko SPBE, form penilaian risiko SPBE, form rencana penanganan risiko SPBE, dan form laporan pemantauan risiko SPBE</p>
5	<p>Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan tindak lanjut perbaikan penerapan manajemen resiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reuiu dan evaluasi secara berkesinambungan.</p>						<p>1. Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang sudah ditetapkan oleh Koordinator SPBE IPPD</p> <p>2. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan hasil penerapan tindak lanjut</p> <p>3. Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko (opsional)</p>

Tabel 3.4. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Keamanan Informasi

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah menerapkan kegiatan Manajemen Keamanan Informasi tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.						
2	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengendalikan Keamanan Informasi dan dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah						Dokumentasi pengendalian keamanan informasi berupa pelaksanaan penetration test, penilaian Indeks KAMI, Vulnerable assessment, dan mekanisme Backup and restore
3	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengendalikan Keamanan Informasi dan dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah memenuhi level 2.						Dokumentasi pengendalian keamanan informasi yang terarah dan sesuai perencanaan yaitu berupa pelaksanaan penetration test, penilaian Indeks KAMI, Vulnerable assessment, dan mekanisme Backup and restore
4	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengendalikan Keamanan Informasi melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD berdasarkan Risiko SPBE						1. Dokumentasi pengendalian Keamanan Informasi yang sudah sesuai standar dan telah memuat kebijakan strategis yang telah ditetapkan berupa

	serta telah direviu dan dievaluasi serta telah memenuhi level 3.						pelaksanaan penetration test, penilaian Indeks KAMI, Vulnerable assessment, mekanisme Backup and restore 2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan reviu dan evaluasi penerapan Keamanan Informasi berupa Undangan rapat pelaksanaan reviu/dokumentasi aktivitas reviu (opsional) serta notulensi/ catatan/telaahan/laporan /rekomendasi tindak lanjut terhadap penerapan Keamanan Informasi 3. Dokumentasi pendukung pelaksanaan reviu/evaluasi harus dilengkapi dengan tanda tangan penanggung jawab kegiatan dan/atau dapat dipertanggung jawabkan.
--	--	--	--	--	--	--	---

5	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan tindak lanjut perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi serta telah memenuhi level 4.					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi pengendalian Keamanan Informasi yang sudah dilakukan perbaikan penerapan berdasarkan rekomendasi dan inisiatif kebijakan strategis berupa pelaksanaan penetration test, penilaian Indeks KAMI, Vulnerable assessment, mekanisme Backup and restore 2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan perbaikan penerapan Keamanan Informasi berupa Notulensi/ catatan/telaahan/laporan 3. pelaksanaan tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi serta Undangan rapat/dokumentasi aktivitas pelaksanaan tindak lanjut penerapan keamanan informasi (opsional)
---	--	--	--	--	--	---

Tabel 3.5. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk Manajemen Data

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah menerapkan kegiatan Manajemen Keamanan Informasi tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.						
2	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah menerapkan Manajemen Data dengan program dan kegiatan yang terarah dan terencana namun dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data						Dokumentasi peta rencana yang memuat program dan kegiatan manajemen Data berupa peta rencana SPBE yang berisi program dan kegiatan Manajemen Data, dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Data, serta data sektoral dan data set pada layanan open data
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah menerapkan Manajemen Data SPBE dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi peta rencana yang memuat program dan kegiatan manajemen data SPBE; 2. Dokumentasi Manajemen Data yang berisi meliputi pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data berupa

							pelaksanaan forum data yang melibatkan produsen data, wali data, pembina data serta data sectoral dan data set pada layanan open data
4	<p>Memenuhi level 3 dan harus mencakup dua kriteria berikut:</p> <p>1. Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman , serta diterapkan ke seluruh unit kerja /perangkat daerah</p> <p>Penerapan Manajemen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah direviu dan dievaluasi</p>						<p>1. Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sudah ditindaklanjuti sesuai berdasarkan rekomendasi/inisatif kebijakan strategis berupa Dokumen pengendalian Manajemen Data yang sudah ditetapkan oleh Koordinator SPBE IPPD, SK dan Kebijakan Keamanan Data</p> <p>2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Data berupa Notulensi/ catatan/telaahan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data serta Undangan rapat/dokumentasi aktivitas reviu/evaluasi (opsional)</p>

5	Memenuhi level 4 serta ada tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Data berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi						<p>3. Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sudah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi /inisatif kebijakan strategis berupa Dokumen kebijakan strategis Manajemen Data SPBE yang sudah ditetapkan oleh Koordinator SPBE IPPD</p> <p>4. Dokumentasi pendukung pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut berupa. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan hasil penerapan tindak lanjut serta Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penyempurnaan penerapan Manajemen Data (opsional)</p>
---	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.6. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Aset TIK

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerapkan Manajemen Aset TIK tanpa program yang terencana						
2	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerapkan Manajemen Aset TIK dengan program dan kegiatan yang terarah dan terencana namun dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK						<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Rencana SPBE yang berisi program dan kegiatan Manajemen Aset TIK 2. Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Aset TIK 3. Daftar aset TIK yang dikelola oleh unit pengelola TIK dan atau unit pengelola asset.
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan Manajemen Aset TIK dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi peta rencana yang memuat program dan kegiatan Manajemen Aset TIK yang berbasis elektronik serta daftar aset TIK pada seluruh unit kerja/perangkat daerah yang telah diberiketerangan (aset idle, dihapus, dsb) 2. Dokumentasi Manajemen Aset TIK yang sudah mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan

							aset TIK berupa Notulensi/ catatan/telaahan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut serta Undangan rapat/ dokumentasi aktivitas revidu dan evaluasi (opsional)
4	<p>Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan Manajemen TIK yang mencakup dua kriteria berikut:</p> <p>1. Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK dan diterapkan ke seluruh unit kerja /perangkat daerah</p> <p>Penerapan Manajemen Aset TIK telah direvidu dan dievaluasi</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang berbasis elektronik dan sudah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi /inisiatif kebijakan strategis 2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut berupa notulensi/ catatan/telaahan/laporan pelaksanaan perbaikan penerapan manajemen Aset TIK serta undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK (opsional)
5	<p>Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah ada tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK berdasarkan hasil revidu dan evaluasi</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK berbasis elektronik yang sudah ditindaklanjuti

								<p>berdasarkan rekomendasi /inisatif kebijakan strategis</p> <p>2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut berupa Notulensi/catatan/telaahan/laporan pelaksanaan perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK, serta undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK (opsional)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 3.7. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi kompetensi SDM SPBE

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE tanpa program yang terencana						
2	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan sesuai dengan perencanaan, namun kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE hanya terpenuhi sebagian						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Peta Rencana yang memuat program dan kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi SDM 3. Laporan hasil pelatihan
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memenuhi kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE seluruhnya						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,

							<p>Evaluasi Jabatan</p> <p>2. Dokumen human capital development plan (HCDP)</p> <p>3. Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM yang mencakup seluruh kebutuhan kompetensi SDM SPBE</p> <p>4. Dokumentasi hasil pelatihan, sertifikasi, dsb</p>
4	<p>Memenuhi level 3 dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan :</p> <p>1. Peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan dan telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen SDM SPBE yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD serta diterapkan kepada seluruh unit kerja Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE</p>						<p>1. Dokumentasi inisiatif strategi peningkatan kompetensi SDM SPBE</p> <p>2. Notulensi/catatan/telaahan/laporan hasil evaluasi/rekomendasi terhadap penerapan pelaksanaan Manajemen SDM SPBE</p>

	telah direviu dan dievaluasi						<ol style="list-style-type: none"> 3. Undangan rapat pembahasan reviu dan evaluasi penerapan SDM SPBE/dokumentasi aktivitas reviu dan evaluasi (opsional) 4. Dokumentasi pendukung pelaksanaan reviu/evaluasi harus dilengkapi dengan tanda tangan penanggung jawab kegiatan dan/atau dapat dipertanggung jawabkan.
5	Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan tindak lanjut melalui perbaikan perencanaan dan model kompetensi sumber daya manusia berdasarkan hasil reviu dan evaluasi						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi penerapan Manajemen SDM SPBE yang sudah dilakukan peningkatan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Tabel 3.8. Peta Rencana pemenuhan kompetensi teknis SDM SPBE

Kompetensi SDM	Program Kerja Pemenuhan Kompetensi Teknis	Sasaran	Tahun Pelaksanaan
Proses Bisnis Pemerintahan	Bimtek Peraturan Menteri PANRB No 19/2018	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi dan Staf TIK seluruh OPD	2024
Arsitektur SPBE	Bimtek Arsitektur SPBE Nasional dan Daerah	Staf Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK Dinkominfo	2024
	Pelatihan TOGAF	Staf Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK Dinkominfo	2025
	Pelatihan Zachman Framework	Staf Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK Dinkominfo	2025
Data dan Informasi	Pelatihan Statistik dan Pengolahan Data	Staf Seksi Pengolahan Data dan Statistik Diskominfo dan Pengolah Data di seluruh OPD	2025
	Pelatihan Database Administrator	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi dan database administrator seluruh OPD	2025
	Pelatihan Analisis dan Desain Basis Data	Staf TIK atau database analyst seluruh OPD	2025

	Pelatihan Integrasi Data	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi dan Staf TIK seluruh OPD	2026
Keamanan	Bimtek Indeks KAMI	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2025
	Pelatihan Security System Administrator	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2025
	Pelatihan & Sertifikasi standar SMKI SNI ISO/IEC 27001	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2025
	Pelatihan & Sertifikasi CISM	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2026
	Pelatihan & Sertifikasi CISSP	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2027
	Pelatihan & Sertifikasi CCSP	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2027
Aplikasi SPBE	Pelatihan Web design	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau web designer seluruh OPD	2024

	Pelatihan System analyst	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau system analyst seluruh OPD	2024
	Pelatihan Pemrograman PHP	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau programmer seluruh OPD	2024
	Pelatihan Web administrator	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau admin web seluruh OPD	2024
	Pelatihan System administrator	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau admin sistem seluruh OPD	2025
	Pelatihan Manajemen Aplikasi	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau staf TIK seluruh OPD	2025
	Pelatihan Pemrograman Java	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau programmer seluruh OPD	2026
	Pelatihan Pemrograman Python	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau programmer seluruh OPD	2026
Infrastruktur	Pelatihan Teknisi Jaringan	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2025

	Pelatihan Teknisi Komputer	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK seluruh OPD	2024
	Pelatihan Network Administrator	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2025
	Pelatihan & Sertifikasi Desain Jaringan Komputer CCNA	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2025
	Pelatihan & Sertifikasi Desain Jaringan Komputer CCDA	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2026
	Pelatihan & Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer CCDP	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2026
	Pelatihan & Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer CCIP	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2027
	Pelatihan & Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer CCIE	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2027

Tabel 3.9. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Pengetahuan

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.						
2	Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan tetapi dilaksanakan tanpa standar /pedoman						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Pengetahuan 2. Dokumentasi yang menggambarkan selbagian dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan

3	<p>Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan mengacu pada standar /pedoman IPPD dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aplikasi Learning Management System (LMS) yang memuat terkait pengetahuan SPBE 2. Dokumentasi yang menggambarkan seluruh aktivitas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan. 3. Sistem aplikasi yang digunakan harus dapat dipastikan /dibuktikan bahwa dikelola dan digunakan
---	--	--	--	--	--	--	--

4	<p>Memenuhi level 3 dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan:</p> <p>1. Seluruh unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dan telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi</p> <p>Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah direviu dan dievaluasi</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aplikasi Learning Management System (LMS) yang memuat terkait pengetahuan SPBE yang mencakup seluruh unit kerja/perangkat daerah 2. Notulensi/catatan/telaahan/laporan/rekomendasi perbaikan atas penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE Undangan rapat/dokumentasi aktivitas reviu dan evaluasi (opsional)
5	<p>Memenuhi level 4 serta ada tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi yang menunjukkan pemutakhiran aplikasi LMS 2. Notulensi/catatan/telaahan/laporan/ pelaksanaan perbaikan

								penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE 3. Undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan (opsional)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.10. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Perubahan SPBE

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.						
2	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE sesuai dengan perencanaan, namun hanya dilaksanakan oleh sebagian unit kerja /perangkat daerah						Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE. Sebagian unit kerja/perangkat daerah yang

							dimaksud adalah
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah						Dokumentasi Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah, bisa berupa pengisian matriks/form dan log dari setiap tahapan /proses Manajemen Perubahan
4	Memenuhi level 3 dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap kegiatan/penerapan Manajemen Perubahan SPBE						1. Dokumen formal terkait Manajemen Perubahan yang sudah berisi inisiatif strategis dan ditetapkan oleh Tim

						<p>Koordinasi SPBE IPPD</p> <p>2. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan/rekom en dasi perbaikan atas penerapan Manajemen Perubahan SPBE</p> <p>3. Undangan rapat/dokumentasi aktivitas reuiu dan evaluasi (opsional)</p>
5	Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Perubahan berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi					<p>1. Dokumen terkait Manajemen Perubahan yang sudah diperbaiki dan dilakukan penyempurnaan serta ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD</p> <p>2. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan/pelak sanaan penerapan Manajemen</p>

							Perubahan SPBE yang telah diperbaiki/disempurnakan 3. Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penerapan Manajemen Perubahan SPBE yang sudah dilakukan perbaikan (opsional)
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.11. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Layanan

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Layanan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.						
2	Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun hanya dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE						Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE

3	Memenuhi level 2 dan Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan pada seluruh proses manajemen Layanan SPBE						<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir: service catalogue, prioritas penanganan gangguan, rencana keberlangsungan layanan, permintaan layanan, penanganan gangguan, laporan ketersediaan layanan, laporan evaluasi layanan laporan exception, dsb 2. Dokumen SLA, OLA, UC Jika IPPD sudah menerapkan proses manajemen layanan SPBE yang hanya meliputi pelayanan pengguna (pengaduan, permintaan) maka dapat berada di level 3
4	Memenuhi level 3 dan Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus						<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan sistem/aplikasi pengelolaan manajemen

	<p>mencakup kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Layanan SPBE telah ditetapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan 2. Kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah direviu dan dievaluasi 						<ol style="list-style-type: none"> layanan SPBE 2. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan/rekomendasi perbaikan atas penerapan Manajemen Layanan SPBE 3. Undangan rapat/dokumentasi aktivitas reviu dan evaluasi (opsional)
5	<p>Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Layanan SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi</p>						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi terkait Manajemen Layanan SPBE yang sudah diperbaiki dan dilakukan penyempurnaan 2. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan/pelaksanaan penerapan Manajemen Layanan SPBE yang telah diperbaiki /disempurnakan

								3. Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penerapan Manajemen Layanan SPBE yang sudah dilakukan perbaikan (opsional)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3 Peta Rencana Layanan SPBE

Tabel 3.12. Peta Rencana SPBE untuk muatan Layanan SPBE

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output/Luaran	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:									
3	Layanan SPBE								
3.1.	Penyusunan Domain Arsitektur Layanan								
3.1.1.	Penyusunan dan perbaikan Domain Arsitektur Layanan sesuai dengan SE Kemenpan RB No. 18/2022	Diskominfo	Dokumen Arsitektur Layanan yang minimal memuat layanan : 1. layanan terkait perizian dan akreditasi 2. layanan terkait pekerjaan umum 3. layanan terkait kesehatan 4. layanan terkait bantuan sosial 5. layanan terkait hukum dan	sudah ada tetapi belum mengacu ke peraturan terbaru					

			keamanan 6. layanan terkait pendidikan 7. layanan terkait pemerintahan umum 8. layanan data terbuka dalam kerangka Satu Data Indonesia					
3.2	Survei Pengguna SPBE							
3.2.1.	Survei untuk mengetahui kebutuhan pengguna SPBE	Diskominfo	Dokumen laporan kebutuhan pengguna SPBE. 1. Survey Pengguna SPBE a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE; b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan					

			<p>kepada masyarakat sesuai dengan harapan;</p> <p>c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Padang Pariaman.</p>					
3.2.2.	Survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna SPBE	Diskominfo	Dokumen laporan tingkat kepuasan pengguna SPBE					
3.3.	Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan							
3.3.1.	Integrasi Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran dan Layanan Keuangan - penambahan fitur - penambahan report - evaluasi secara berkala - perbaikan berkesinambungan	Badan Pendapatan Daerah, BAPPELITBAN GDA	Integrasi layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan. Saat ini menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kemendagri.					
3.3.2.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa - integrasi dengan LKPP - penambahan fitur dan report - evaluasi secara	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi LPSE yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).					

	berkala - perbaikan secara berkesinambungan	Setda Padang Pariaman, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Padang Pariaman	Pemkab. Padang Pariaman mengembangkan beberapa modul untuk penambahan fitur baru yang dibutuhkan.					
3.3.3.	Layanan Kepegawaian - integrasi dengan BKN - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi secara berkala - perbaikan secara berkesinambungan	BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman	Aplikasi kepegawaian yang terhubung ke aplikasi kepegawaian nasional, dan juga terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya					
3.3.1.	Integrasi Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran dan Layanan Keuangan - penambahan fitur - penambahan report - evaluasi secara berkala - perbaikan berkesinambungan	Badan Pendapatan Daerah, BAPPELITBAN GDA	Integrasi layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan. Saat ini menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kemendagri.					
3.3.5.	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.					

	perbaikan secara berkala							
3.3.6.	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.					
3.3.7.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.					
3.3.8.	Layanan Kinerja Pegawai - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, Bagian Organisasi Setda Kab. Padang Pariaman	Layanan Kinerja Pegawai yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.					

3.4.	Portal Layanan Publik Terintegrasi Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah							
3.4.1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika	SP4N-LAPOR! yang dikembangkan oleh Kemenpan-RB diintegrasikan dengan aplikasi pengaduan yang sudah dikembangkan oleh Pemkab. Padang Pariaman					
3.4.2.	Layanan Data Terbuka - update data terbaru secara berkala - penambahan fitur data analitik - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Data Terbuka Pemkab. Padang Pariaman yang terintegrasi dengan layanan lainnya					
3.5.	Pembangunan Portal Data Daerah							
3.5.1.	Pembangunan Portal Data Daerah Pemkab. Padang Pariaman - konten yang selalu diperbarui secara berkala - penambahan fitur transaksi dan data analitik - selalu dievaluasi dan diperbaiki	Dinas Komunikasi dan Informatika	Portal Data Pemkab. Padang Pariaman					
3.6.	Penyelenggaraan Manajemen							

	Layanan							
3.6.1.	Adanya manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penerapan Manajemen Layanan sesuai dengan Peta Rencana dan Pedoman Manajemen Layanan yang sudah ditetapkan					
3.6.2.	Adanya portal pusat layanan service desk terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia Portal Pusat Layanan Service Desk					

3.4 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Tabel 3.13. Peta Rencana SPBE untuk muatan Aplikasi SPBE

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:									
4	Aplikasi SPBE								
4.1.	Penyusunan Domain Arsitektur Aplikasi								
4.1.1.	Penyusunan Domain Arsitektur Aplikasi sesuai dengan SE Kemenpan RB No. 18/2022	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen arsitektur domain Aplikasi SPBE sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat: 1. aplikasi terkait perizinan dan akreditasi; 2. aplikasi terkait pekerjaan umum; 3. aplikasi terkait kesehatan; 4. aplikasi terkait bantuan sosial; 5. aplikasi terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6. aplikasi terkait pendidikan; 7. aplikasi terkait pemerintahan umum; dan	sudah ada tetapi masih belum sesuai dengan SE Kemenpan RB no 18/2022					

			8. portal Satu Data Indonesia.				
4.1.2.	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>A. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;</p> <p>B. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik</p>	Belum Ada			

			<p>untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;</p> <p>C. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;</p> <p>D. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.</p>					
4.2.	Aplikasi Administrasi Pemerintahan							
4.2.1.	SIPD	BAPPELITBAN GDA	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan				

				update data				
4.2.2.	SIMPEG - penambahan fitur data analitik - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - integrasi dengan SIMPEG Nasional	BKPSDM KABUPATEN PADANG PARIAMAN	simpeg adalah aplikasi berbasis website untuk manajemen kepegawaian ASN di Kabupaten Padang Pariaman	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.2.3.	SIPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi pelayanan keuangan dan aset daerah mulai dari pencatatan aset, pengajuan dan pencairan keuangan daerah, pengelolaan kas daerah, sampai dengan laporan akuntansi. Penginputan dan laporan aset daerah, pembuatan SPP SPM SP2D, pengelolaan kas daerah dan laporan akuntansi	sudah ada (Aplikasi Pusat) Perlu optimalisasi lebih lanjut				
4.2.5.	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Padang	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	sudah ada tetapi perlu Perintregraisian dengan				

		Pariaman		portal lain				
4.2.6	SIRUP	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan	sudah ada tetapi perlu Perintregraisian dengan portal lain				
4.2.7.	Layanan Pengaduan Online Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)	Inspektorat Kabupaten	Aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional digunakan untuk menerima dan menyelesaikan laporan berupa aspirasi, pengaduan dan permintaan informasi yang berasal dari masyarakat yang dikoordinir oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan optimalisasi pemanfaatan				
4.3.	Aplikasi Umum Layanan Publik							
4.3.1.	SP4N-LAPOR	Dinas Komunikasi dan	Aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik digunakan untuk	sudah ada tetapi perlu				

		Informatika	menerima dan menyelesaikan Laporan	optimalisasi pemanfaatan				
4.3.2.	Satu data - penambahan fitur baru - layanan transaksi dan analitik data - integrasi dengan Satu Data Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika	Publikasi data statistik	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.3.3.	JDIH - penambahan fitur transaksi - integrasi dengan JDIH Nasional - update data terbaru - penambahan fitur data analitik	Bagian Hukum Setda	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.3.4	PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika	Portal Informasi Publik	Sudah ada dan perlu penambahan fitur				
4.3.5	SIMPEL (Sistem Informasi Perizinan Elektronik)	DPMPTP	Aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan perizinan non berusaha(seperti Izin Reklame, Surat	Sudah ada dan perlu dikembangkan				

			Izin Praktek Tenaga Kesehatan, dll) serta untuk pemenuhan komitmen perizinan berusaha.	n				
4.4.	Aplikasi Khusus							
4.4.1	SIMAK Kinerja (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja)	Bag. Organisasi	SIMAK Kinerja (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja) merupakan rangkaian sistem dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi	Sudah ada tapi perlu di tingkatkan				
4.4.2	Aplikasi Layanan SPBE	Dinas Kominfo	Portal Layanan sistem pemerintah berbasis elektronik	Sudah ada dan perlu di tingkatkan fitur dan				

				layanan				
4.4.3	Pusdaka	BPBD	menyampaikan informasi kejadian bencana yang ada di Kab. padang pariaman melalui media website	Sudah ada dan perlu dikembangkan				
4.4.4	SIMUNAV2 (Sistem Informasi Manajemen V2)	BPBD	memeberikan infromasi daerah rawan bencana secara cepat, dan tepat terhadap masyarakat dalam bentuk peta berbasis Sistem Informasi Geografis	Sudah ada dan perlu dikembangkan				
4.4.5	Aplikasi Call Center 112	BPBD	Menerima dan merekap telpon masyarakat yang masuk melalui call center 112	Sudah ada dan perlu dikembangkan				
4.4.6	SIM-PBB	BPKD	Aplikasi ini merupakan aplikasi pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan	Perlu ditingkatkan dan digabungkan menjadi				

				superaplikasi pajak daerah				
4.4.7	BPHTB	BPKD	Aplikasi bphtb merupakan aplikasi pajak daerah yang berguna untuk pajak jual beli, waris tanah	Perlu ditingkatkan dan digabungkan menjadi superaplikasi pajak daerah				
4.4.8	PADATI	Disparpora	Aplikasi Mobile Destinasi Wisata	Sudah Ada Dan Perlu ditingkatkan				
4.4.9	SIPPAPA	Dinkes	Surat Izin Praktek Padang Pariaman	Perlu ditingkatkan				
4.4.10	SPGDT PSC 119	Dinkes	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu merupakan sebuah sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri unsur pelayanan pra rumah sakit	Sudah ada dan perlu dikembangkan				

4.4.11	SIMRS KHANZA	RSUD	Aplikasi sistem informasi manajemen Rumah sakit	Sudah ada dan perlu dikembangkan				
4.4.12	Aplikasi DCM (dukcapil Ceria Mobile)	Dukcapil	Aplikasi DCM yang memudahkan penduduk dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil secara online	Sudah ada dan perlu dikembangkan				
4.4.13	Aplikasi Sipakem (Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran dan Kematian)	Dukcapil	antarmuka pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil secara Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran dan Kematian online	Sudah ada dan perlu dikembangkan				
4.4.14	Dukcapil Ceria	Dukcapil	antarmuka pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil secara online	Sudah ada dan perlu dikembangkan				
4.4.15	SIMPONI (Sistem Informasi Potensi Ekonomi Nagari)	Bappeda	SIMPONI (Sistem Informasi Potensi	Sudah ada dan perlu				

			Ekonomi Nagari) merupakan aplikasi yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat lokal di Kabupaten Padang Pariaman dalam mengelola sumber daya ekonomi	dikembangkan				
4.4.16	SI RIDA (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah)	Bappeda	Sebagai media penyimpanan dan publikasi terhadap dokumen hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman	Sudah ada dan perlu dikembangkan				
4.4.17	SIDAK PAPA	Bappeda	Untuk mengimputkan realisasi Indikator Kinerja Utama OPD	Su ada dan perlu dikembangkan				
4.4.18	SIKAP	BKPSDM	Sistem informasi kinerja aparatur di Kab. Padang Pariaman	Sudah ada dan perlu dikembangkan				

4.4.19	E-TPP	BKPSDM	Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai secara Elektronik	Sudah ada dan perlu dikembangkan				
4.4.21	SIAP BANA (Sistem Informasi Alur Pelayanan Bersih, Amanah, Netral, Akuntabel)	Kesbangpol	Pembuatan surat rekomendasi izin penelitian mahasiswa dan Pembuatan Surat Rekomendasi Izin Keberadaan Ormas/LSM	Sudah ada dan perlu dikembangkan				

3.5 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Tabel 3.14. Peta Rencana SPBE untuk muatan Infrastruktur SPBE

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:									
5	Infrastruktur SPBE								
5.1.	Fasilitas Komputasi								
5.1.1.	Pusat Data Pemkab. Padang Pariaman Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Padang Pariaman ;	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia layanan Pusat Data Pemkab. Padang Pariaman	sudah tersedia Pusat Data, tetapi kinerjanya harus terus ditingkatkan					

5.1.1.1.	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen SOP layanan pusat data	SOP tidak lengkap				
5.1.1.2.	Integrasi Pusat Data Kab. Padang Pariaman dengan Pusat Data Pemprov Sumatera Barat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Keterhubungan antar Pusat Data Pemkab. Padang Pariaman dengan Pusat Data Pemprov. Sumatera Barat	belum terhubung				
5.1.1.3.	Integrasi Pusat Data Kab. Padang Pariaman dengan Pusat Data Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika	Keterhubungan antar Pusat Data Pemkab. Padang Pariaman dengan Pusat Data Nasional	belum terhubung				
5.1.1.4.	Penambahan kapasitas storage untuk Backup & Recovery pada Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penambahan kapasitas storage	saat ini Storage masih mencukupi				
5.1.1.5.	Upgrade perangkat keras Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penambahan kapasitas perangkat keras	saat ini spesifikasi masih bagus				

5.1.1.6.	Sertifikasi nasional/internasional pusat data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat data yang tersertifikasi nasional/internasional	belum tersertifikasi				
5.1.2.	Pusat Komputasi dan Pusat Kendali. Pusat Komputasi : fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. Pusat Kendali : fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.	Dinas Komunikasi dan Informatika	tersedia layanan Pusat Komputasi & Pusat Kendali	Sudah tersedia dan perlu ditingkatkan				
5.1.2.1.	Penyediaan perangkat keras untuk Pusat Komputasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	perangkat keras Pusat Komputasi & Pusat Kendali	belum tersedia				
5.2.	Sistem Integrasi							
5.2.1.	Jaringan Intra Pemerintah: Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika	tersedia layanan jaringan intra	sudah ada jaringan				

	tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah. Jaringan intra pemerintah daerah kabupaten Padang Pariaman menghubungkan jaringan di semua OPD dan kecamatan/kelurahan.	Informatika		intra, tetapi perlu peningkatan				
5.2.1.1.	Penyusunan kebijakan/SOP terkait jaringan intra Pemkab. Padang Pariaman	Dinas Komunikasi dan Informatika	dokumen SOP jaringan intra	dokumen SOP tidak lengkap				
5.2.1.2.	Interkoneksi jaringan intra ke semua OPD, Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman	Dinas Komunikasi dan Informatika	100% OPD, kecamatan dan Nagari terhubung dalam jaringan intra	sudah ada jaringan intra, tetapi Perlu peningkatan				
5.2.2.	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk	Dinas Komunikasi dan Informatika	Keterhubungan antar Layanan SPBE baik hubungan horizontal (antar layanan dalam Pemkab	baru sebagian kecil				

	melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;		Padang Pariaman) maupun vertikal (dengan Instansi Pusat)					
5.3.	Platform							
5.3.1.	Infrastruktur dan Aplikasi: Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi/layanan SPBE.	Dinas Komunikasi dan Informatika	ketersediaan Infrastruktur dan Aplikasi pendukung SPBE	sudah ada tetapi harus selalu ditingkatkan				
5.3.2.	Komputasi Awan: Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika	penerapan Komputasi Awan untuk mendukung SPBE	belum ada				
5.4.	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE							
5.4.1.	Peningkatan bandwidth jaringan intranet dan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	distribusi bandwidth tidak merata				

5.4.2	Pengukuran Quality of Service (QoS) dari jaringan intra	Dinas Komunikasi dan Informatika	adanya jaminan kualitas layanan jaringan (QoS) yang terukur	belum dilakukan				
5.4.3.	Penyediaan Service Desk Center	Dinas Komunikasi dan Informatika	tersedia layanan Service Desk Center	belum ada				
5.4.4.	Penyediaan Help Desk Center	Dinas Komunikasi dan Informatika	tersedia layanan Help Desk Center	belum ada				

3.6 Peta Rencana Keamanan SPBE

Tabel 3.15. Peta Rencana SPBE untuk muatan Keamanan SPBE

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:									
6	Keamanan SPBE								
	Referensi : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah								
6.1.	Penyusunan Kebijakan terkait Keamanan Informasi								
6.1.1.	Penyusunan rencana strategis Keamanan Informasi	Tim koordinasi SPBE	Dokumen rencana strategis Keamanan Informasi	belum ada					
6.1.2.	Penetapan arsitektur Keamanan Informasi	Tim koordinasi SPBE	Dokumen arsitektur keamanan informasi	belum ada					

6.1. 3.	Penetapan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi yang memuat: infrastruktur teknologi informasi - desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan - aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi	Tim koordinasi SPBE	Dokumen tata kelola/SOP terkait keamanan informasi	belum ada				
6.2.	Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi							
6.2.1.	Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		belum dilakukan				
6.2.2.	Pengelolaan sumber daya manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen rencana pengembangan SDM SPBE terkait keamanan informasi	sudah dilakukan tetapi tidak terencana				
6.2. 2.1	Pelatihan teknis dasar keamanan siber	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kompetensi SDM bidang keamanan siber	belum dilakukan				

6.2. 2.2	Pelatihan teknis dasar persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kompetensi SDM bidang teknik persandian	belum dilakukan				
6.2. 2.3	Pelatihan teknis berbasis kamus kompetensi teknis bidang keamanan siber dan persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan				
6.2. 2.4	Pelatihan teknis berbasis standar kompetensi kerja nasional indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan				
6.2. 2.5	Pelatihan teknis berbasis standar kompetensi khusus atau internasional	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan				
6.2. 2.6	Pelatihan teknis berbasis standar kompetensi khusus atau internasional	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan				
6.2. 2.7	Pelatihan teknis penerapan kebijakan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan				

6.2.3.	Manajemen pengetahuan - Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penerapan manajemen pengetahuan untuk bidang keamanan informasi	draft pedoman Manajemen Pengetahuan sudah ada				
6.3.	Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non-elektronik							
6.3.1.	Analisis kerawanan dan risiko terhadap sistem elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan analisis kerawanan	belum dilakukan				
6.3.2.	Penyusunan dokumen manajemen risiko keamanan informasi beserta mitigasi risiko	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen manajemen risiko keamanan informasi beserta mitigasi risiko	sudah ada draft manajemen risiko				
6.3.3.	Penerapan Sertifikat Elektronik pada semua layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia layanan Sertifikat Elektronik	belum ada				
6.3.4.	Pendirian dan Pengelolaan Pusat operasi Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia Pusat Operasi Pengamanan Informasi	belum ada				
6.4.	Penyediaan layanan Keamanan Informasi							

6.4. 1.	Identifikasi kerentanan keamanan: Identifikasi kerentanan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE, analisis kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan identifikasi kerentanan keamanan sistem jaringan	sudah pernah dilakukan tetapi tidak terencana dan tidak rutin				
6.4. 2.	Asistensi dan penguatan keamanan Sistem Elektronik: Peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sistem keamanan pada Sistem Jaringan dan Sistem Elektronik	belum ada				
6.4.	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk	Dinas	Tersedia layanan Sertifikat	belum ada				

3.	melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik	Komunikasi dan Informatika	Elektronik					
6.4. 4.	Perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi	sudah dilakukan sebagian				
6.4. 5.	Sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Manajemen pengamanan Sistem Elektronik sudah tersertifikasi	belum ada				
6.4. 6.	Literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemkab. Padang Pariaman. Kegiatan bisa dalam bentuk workshop, FGD, rapat pengarah, dll.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Edukasi kesadaran keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan	belum dilakukan				

			Aplikasi SPBE dan keamanan infrastruktur SPBE.					
6.4.7.	Pendirian dan pengelolaan pusat penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik dan forensik digital	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia pusat penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik dan forensik digital	sudah ada tetapi perlu penguatan secara berkala				
6.4.8.	Konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan di lingkungan Pemkab. Padang Pariaman	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia layanan konsultasi keamanan informasi di lingkungan Pemkab. Padang Pariaman	perlu dilakukan secara terus menerus				

3.7 Peta Rencana Audit TIK

Tabel 3.16. Peta Rencana SPBE untuk muatan Audit TIK

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target			
				2023	2024	2025	2026	2027
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:								
Indikator								
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
7	Audit TIK							
7.1.	Audit Aplikasi							
7.1.1.	Penyusunan draft dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Aplikasi	Diskominfo	Pedoman Audit aplikasi telah disusun dan diperbaharui	Draft Pedoman audit aplikasi belum disusun				
7.1.2.	Audit Aplikasi Khusus di lingkungan Pemkab Padang Pariaman	Diskominfo	Audit aplikasi khusus telah dilakukan	Audit Aplikasi Khusus di lingkungan Pemkab Padang Pariaman belum dilakukan				
7.1.3	Audit Aplikasi Umum di lingkungan Pemkab Padang Pariaman	Diskominfo	Audit aplikasi umum telah dilakukan	Audit Aplikasi Umum di				

				lingkungan Pemkab Padang Pariaman belum dilakukan				
7.1.4	Tindak lanjut hasil audit aplikasi	Diskominfo	Tindak lanjut hasil audit aplikasi telah dilakukan	Tindak lanjut hasil audit aplikasi belum dilakukan				
7.1.5	Pelatihan dan sertifikasi audit aplikasi	Diskominfo	Pelatihan dan sertifikasi audit aplikasi telah dilakukan	Pelatihan dan sertifikasi audit aplikasi belum dilakukan				
7.2.	Audit Infrastruktur							
7.2.1	Penyusunan dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Infrastruktur	Diskominfo	Pedoman audit infrastruktur telah disusun dan diperbaharui	Pedoman Audit Infrastruktur belum disusun				
7.2.2	Audit Infrastruktur di lingkungan Pemkab Padang Pariaman	Diskominfo	Audit infrastruktur telah dilakukan	Audit Infrastruktur di lingkungan Pemkab Padang Pariaman belum dilakukan				
7.2.3	Tindak lanjut hasil audit aplikasi	Diskominfo	Tindak lanjut hasil audit infrastruktur telah dilakukan	Tindak lanjut hasil audit aplikasi belum dilakukan				
7.2.4	Pelatihan dan sertifikasi audit infrastruktur	Diskominfo	Pelatihan dan sertifikasi audit infrastruktur telah digunakan	Pelatihan dan sertifikasi audit infrastruktur belum dilakukan				
7.3.	Audit Keamanan							
7.3.1	Penyusunan dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Keamanan	Diskominfo	Pedoman audit keamanan telah disusun dan	Dokumen Pedoman Audit				

			diperbaharui	Keamanan belum disusun				
7.3.2	Audit Keamanan di lingkungan Pemkab Padang Pariaman	Diskominfo	Audit keamanan telah dilakukan	Audit Keamanan di lingkungan Pemkab Padang Pariaman belum dilakukan				
7.3.3	Tindak lanjut hasil audit keamanan	Diskominfo	Tindak lanjut hasil audit keamanan telah dilakukan	Tindak lanjut hasil audit keamanan belum dilakukan				
7.3.4	Pelatihan dan sertifikasi audit keamanan	Diskominfo	Pelatihan dan sertifikasi audit keamanan	Pelatihan dan sertifikasi audit keamanan belum dilakukan				

BAB 4 Rencana dan Anggaran

Pada bab 4 ini akan membahas terkait perencanaan anggaran mulai dari pengadaan dalam penyelenggara dan SDM SPBE, aplikasi dan anggaran paket pekerjaan.

4.1. Rencana Anggaran Penyelenggara dan SDM SPBE

Rencana anggaran Penyelenggara SDM SPBE merupakan kisaran rincian anggaran dalam pemenuhan dan penyelenggaraan SDM yang diusulkan. Kisaran anggaran ini diperoleh berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan. Tujuan pemberian kisaran anggaran ini agar dapat memberikan tunjangan terkait SDM usulan dan membantu proses manajemen pada masing-masing Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Anggaran tertulis dalam dokumen ini bisa disesuaikan Kembali dengan kompleksitas kebutuhan dan manajemen dari setiap PD Kisaran Biaya Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE.

4.1.1. Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE

Pada bagian rencana anggaran pengadaan SDM penyelenggara SPBE, dijelaskan mengenai usulan rincian anggaran dalam pengadaan SDM Penyelenggara SPBE sesuai dengan 9 kompetensi yang harus dimiliki yakni Teknisi Komputer, Teknisi & Admin Jaringan, Service/Help Desk, Admin Website, Admin Database, Analis Sistem & Desain, Programmer, Operator/User Sistem, dan Admin Keamanan TI. Rencana anggaran ini didapat berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan mencari perkiraan harga yang sesuai dari sumber yang terpercaya. Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE

No	Kompetensi	Job Level		
		Entry Level	Experienced	Senior
1	Operator/User Sistem	Rp2.500.000	Rp2.800.000	Rp 3.200.000
2	Programmer	Rp4,804,681	Rp6,002,875	Rp6,568,613
3	Admin Website	Rp3,021,329	Rp3,335,049	Rp3,885,717
4	Admin Database	Rp4,588,769	Rp6,012,100	Rp6,524,008
5	Analisis dan Desain Sistem	Rp6,158,207	Rp7,634,429	Rp8,509,205
6	Teknisi Komputer	Rp3,048,012	Rp4,041,548	Rp4,225,637

7	<i>Service/Help Desk</i>	Rp3,147,070	Rp3,500,000	Rp4,000,000
8	Admin Jaringan	Rp3,048,012	Rp4,041,548	Rp4,225,637
9	Administrator Keamanan TI	Rp10,000,000	Rp12,000,000	Rp15,000,000

Sumber: <https://gajimu.com/>

4.1.2. Rencana Anggaran Pengembangan Kompetensi SDM SPBE

Rencana anggaran pengembangan kompetensi SDM SPBE merupakan acuan dalam perencanaan anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM SPBE baik yang dimiliki maupun yang diusulkan. Bentuk pengembangan kompetensi SDM SPBE yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi. Tujuannya pengembangan kompetensi ini adalah guna menunjang tugas dari teknisi dalam melakukan operasional TIK.

A. Rencana Anggaran Pelatihan

Rencana anggaran biaya pelatihan pada **Tabel 4.2** dibawah ini, dapat menjadi acuan untuk pengadaan pada masing-masing teknisi. Detail kisaran anggaran didapatkan pada beberapa Lembaga penyedia pelatihan.

Tabel 4. 2 Rencana dan Anggaran Pelatihan

Pelatihan	Kisaran Harga Pelatihan	Sumber
Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Rp8.000.000	itgid.org
Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Rp12.000.000	itgid.org
Manajemen Proyek (PMP)	Rp6.500.000	pmexcellent.com
Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Rp4.950.000	trainingcenter.co.id
<i>Enterprise Architecture</i> (TOGAF)	Rp11.000.000	itgid.org

<i>Business Process Re-Engineering</i>	Rp3.900.000	e-trainingonline.com
<i>Business Process Management</i>	Rp3.900.000	trainingcenter.co.id
Analisis dan <i>Software Testing</i>	Rp799.000	expertindo-training.com
<i>Programmer</i> (OCA, OCP)	Rp2.000.000	reed.co.uk
Desain Basis Data (Database) (<i>Online</i>)	Rp799.000	udemy.com
<i>Big Data Anayst</i> (<i>Online</i>)	Rp279.000	udemy.com
Administrasi Basis Data (MCDBA)	Rp981.376- Rp5.153.533	newhorizons.com
Integrasi Data	Rp799.000	udemy.com
Desain Jaringan Komputer (CCDA) (<i>Online</i>)	Rp279.000	udemy.com
Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Rp429.000	skillacademy.com
<i>Service Desk</i> (CompTIA A+) (<i>Online</i>)	Rp279.000	udemy.com
Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (<i>Online</i>)	Rp5.692.134	udemy.com
GIS (<i>Geographic Information System</i>)	Rp42.798.000	esri.com
<i>Artificial Intelligence</i> (AI)	Rp1.599.000	towardsdatascience.com
Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Rp11.412.800	netcampus.co.id
Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Rp12.000.000	itgid.org
Desainer Multimedia	Rp6.500.000	indo-asia.com
Desainer Grafis	Rp2.150.000	netcampus.co.id
IoT (<i>Online</i>)	IoT (<i>Online</i>)	IoT (<i>Online</i>)
Rp799.000	Rp799.000	Rp799.000
udemy.com	udemy.com	udemy.com

Web Content Management Social Media (Online)	Rp799.000	udemy.com
Rp799.000	Rp799.000	Rp799.000
udemy.com	udemy.com	udemy.com

B. Kisaran Biaya Sertifikasi

Kisaran biaya sertifikasi pada **Tabel 4.3** dibawah ini, dapat menjadi acuan untuk pengadaan pada masing-masing teknisi. Detail kisaran anggaran didapatkan pada beberapa Lembaga penyedia sertifikasi.

Sertifikasi	Kisaran Harga Sertifikasi	Sumber
Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Rp6.900.000	itgid.org
Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Rp8.500.000	itgid.org
Manajemen Proyek (PMP)	Rp7.917.630	pmexcellent.com
Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Rp4.950.000	itamorg.com
<i>Enterprise Architecture (TOGAF)</i>	Rp10.500.000	itgid.org
<i>Business Process Re-Engineering</i>	Rp5.450.000	bpminstitute.org
<i>Business Process Management</i>	Rp5.750.000	bpminstitute.org
<i>Analisis dan Software Testing</i>	Rp3.595.750	iccp.org

<i>Programmer</i> (OCA, OCP)	Rp 3,530,450	blogs.oracle.com
Desain Basis Data (Database)	Rp 3,530,450	education.oracle.com
<i>Big Data Anayst</i>	Rp3.000.000	theproductcompany.com
Administrasi Basis Data (MCDBA)	Rp 1.711.92	newhorizons.com
Integrasi Data	Rp2.000.000	talend.com
Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Rp279.000	cbt nuggets.com
Administrasi Jaringan Komputer (CCNA <i>Routing and Switching</i>)	Rp5.150.000	cbt nuggets.com
<i>Service Desk</i> (CompTIA A+)	Rp9.258.634	comptia.org
Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Rp.5.692.134	comptia.org
GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)
Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000
esri.com	esri.com	esri.com
Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)
Rp7.846.300	Rp7.846.300	Rp7.846.300
Desainer Grafis	Rp2.150.000	netcampus.co.id
IoT	Rp2.000.000	docs.microsoft.com
<i>Cloud Computing</i> (AWS)	Rp286,22	digitalcloud.training
ERP Analis	Rp799.000	indo-asia.com
<i>Data Center Technical Support</i> (CCNA Data	Rp4.279.800	cbt nuggets.com

Center)		
<i>IT Disaster Recovery</i>	Rp9.000.000	itgid.org

4.2. Rencana Anggaran Manajemen SPBE

Rencana anggaran manajemen ini didapat dengan melakukan benchmark dari beberapa vendor konsultan TI. Manajemen SPBE disini dilakukan dengan pendampingan penyiapan dokumen kebutuhan manajemen dana pemberian bimtek terhadap SDM terkait. Kisaran harga ini berlaku untuk pelaksanaan manajemen di satu PD. Harga dapat bertambah tergantung dari lingkup pelaksanaan manajemen tersebut. Detail anggaran dapat dilihat pada **Tabel 4.4** berikut.

Tabel 4.4 Rencana Anggaran Biaya Manajemen SPBE

Manajemen SPBE	Kisaran Anggaran
Manajemen Risiko	100 – 150 jt
Manajemen Keamanan Informasi	150 – 175 jt
Manajemen Data	150 – 175 jt
Manajemen Aset TIK	100 – 150 jt
Manajemen SDM	100 – 150 jt
Manajemen Pengetahuan	100 – 150 jt
Manajemen Perubahan	100 – 150 jt
Manajemen Layanan	100– 150 jt

4.3. Rencana Anggaran Pembuatan SOP Layanan SPBE

Rencana anggaran dalam pembuatan SOP didasarkan pada seberapa kompleks alur proses bisnis yang akan direncanakan. Umumnya anggaran dalam pembuatan SOP berkisar di angka 36 sampai 50 juta. Kisaran anggaran ini didapatkan dari *benchmark* beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Kisaran anggaran ini untuk, penyusunan form, jumlah *user* pengguna aplikasi, berapa kali proses pelaksanaan sosialisasi SOP dan

jumlah SOP pelengkapanya. Penentuan kisaran SOP terbagi menjadi 3 yaitu kompleksitas sedang rendah dan tinggi. Penjelasannya seperti di bawah ini:

- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas **rendah**, maka anggarannya berkisar **antara 36-40 juta**. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 2 SOP pendukung.
- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas **sedang**, maka anggarannya berkisar antara **40-45 juta**. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 3 SOP pendukung.
- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas **tinggi**, maka anggarannya berkisar antara **45-50 juta**. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 4 SOP pendukung, karena SOP ini pendukung layanan yang didukung oleh aplikasi dengan memiliki beberapa modul dan beberapa alur yang berbeda namun tetap dalam satu layanan SPBE.

4.4. Rencana Anggaran Arsitektur Aplikasi SPBE

Rencana anggaran arsitektur aplikasi SPBE yang dibahas pada sub bab ini merupakan perkiraan anggaran, di mana dalam dokumen ini bersifat prediksi dan dibuat dengan metode perbandingan dengan harga saat ini (*benchmark*) sehingga tentu secara fleksibel dapat berubah menyesuaikan standar harga pada tahun berjalan. Aktivitas ini menghasilkan daftar prakiraan biaya untuk setiap aplikasi yang direkomendasikan. Hasil prakiraan diperoleh dari hasil analisis dengan sembilan indikator perhitungan, yaitu:

- a) Potensi integrasi dengan PD lain.** Jika terdapat potensi integrasi dengan PD lain maka diberi nilai 2, jika tidak maka diberi nilai 1. Jika terdapat intergrasi dengan pemerintah Pusat/Provinsi dan Perusahaan maka akan diberi nilai 3
- b) Jumlah tabel database.** Jika jumlah table kurang dari 50 dan lebih dari 20 maka kompleksitasnya sedang dan diberi nilai 2 Jika jumlah tabel lebih dari 50 maka dikatakan kompleks dan diberikan nilai 3, sedangkan jika kurang dari 20 tabel diberikan nilai 1.
- c) Jumlah aplikasi yang terintegrasi.** Jika terdapat minimal 3 aplikasi yang terintegrasi maka diberikan nilai 3, dan jika terdapat 2 aplikasi yang saling terintregrasi maka diberi nilai 2 sedangkan jika integrasi kurang dari 2 diberikan nilai 1.

- d) **Jumlah kelompok user.** Jika kelompok user lebih dari 4 maka dikatakan kompleks dan diberikan nilai 3, sedangkan jika kurang dari 4 dan tidak lebih dari 2 kelompok user maka diberikan nilai 2. Sedangkan jika hanya 1 user akan dibobot 1
- e) **Jumlah fitur.** Jika terdapat fitur lebih dari 10 fitur maka akan diberikan nilai 3, dan Jika terdapat sekurang-kurangnya 10 fitur maka diberikan nilai 2, sedangkan jika fitur kurang dari 5 maka diberikan nilai 1.
- f) **Jumlah pengguna.** Jika pengguna lebih dari 500 maka diberikan nilai 3 Jika pengguna berjumlah kurang dari sampai dengan 100 maka diberikan nilai 2, jika pengguna kurang dari 200 maka diberikan nilai 1.
- g) **Besar data pertransaksi.** Jika terdapat tautan file data yang dilampirkan maka diberikan nilai 2, jika sebaliknya maka diberikan nilai 1.
- h) **Panjang alur proses bisnis.** Jika proses bisnis usulan SI/ pengembangan SI eksisting lebih dari 10 langkah maka diberikan nilai 3, dan Jika proses bisnis usulan SI/ pengembangan SI eksisting 4 sampai 9 langkah maka diberikan nilai 2, jika kurang dari 4 langkah diberikan nilai 1.
- i) **Konsistensi *maintenance*.** Jika aplikasi yang diusulkan perlu untuk dilakukan pengembangan berkala, misal dalam kurun waktu satu (1) tahun sekali dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aplikasi tersebut, maka diberikan nilai 3. Sedangkan jika tidak diperlukan pengembangan berkala diberikan nilai 1.

Penentuan nilai kompleksitas dari sebuah aplikasi ini dikelompokkan menjadi 4 tipe berdasarkan kompleksitas pembangunan aplikasi, diantaranya sebagai berikut :

- **Pengembangan minor:** pengembangan yang hanya memerlukan penambahan sedikit fitur, seperti penambahan hak akses, dan update data yang pengembangannya dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Internal PD yang memiliki PD Mandiri TIK. Aplikasi usulan menggunakan aplikasi dari pusat juga termasuk dalam kategori ini. Untuk kategori pengembangan minor tidak membutuhkan biaya (**Rp 0**)
- **Dasar:** Halaman dengan informasi statis dan biayanya sekitar **75 juta (75 – 100 juta).**

- **Kompleksitas Sedang:** Halaman dengan informasi statis, beberapa unit fungsional dan API, juga integrasi pihak ketiga. Biaya aplikasi berbasis web di tingkat kompleksitas sedang **sekitar 125 juta (101 – 175 juta)**.
- **Sangat Kompleks:** Semua fitur dari “Kompleksitas Sedang”, ditambah aktivitas multi pengguna, *high user load*, dan statistik khusus. Biayanya bisa mencapai **200 juta (176 – 300 juta)**.

Sehingga, hasil perhitungan *benchmark* dan *range* anggaran dapat dilihat seperti pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Perhitungan Aplikasi

Skor	Kompleksitas	Rentang Harga
0	Pengembangan minor	0
1 - 9	Kompleksitas Dasar	75 - 100 juta
10-18	Kompleksitas Sedang	101 - 175 juta
19-27	Sangat Kompleks	176 - 300 juta

Aplikasi rentang harga 0 diberikan jika pengembangan aplikasi minor, yaitu pengembangan yang hanya memerlukan penambahan sedikit fitur, seperti penambahan hak akses, dan update data yang pengembangannya dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika atau Internal PD yang memiliki SDM TIK (Programmer). Aplikasi Rentang harga 0 juga berlaku untuk usulan menggunakan aplikasi dari pusat. Kisaran anggaran untuk masing-masing aplikasi dari **71 (Tujuh Puluh Satu)** yang diusulkan akan disajikan pada **Tabel 4.6**.

No	Perangkat Daerah	Aplikasi	Detail Aplikasi	Pengembang	Rentang Harga
	Inspektorat	Portal Whistle Blowing System (WBS)	Pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bernalar atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh ASN atau pejabat instansi di lingkungan PemKab Padang Pariaman	Kominfo	75 – 100 Jt
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman	SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dengan target pengguna yaitu seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	Pusat	0
	KESBANGPOL	SIAP BANA (Sistem Informasi Alur Pelayanan Bersih, Amanah, Netral, Akuntabel)	Pembuatan surat rekomendasi izin penelitian mahasiswa dan Pembuatan Surat Rekomendasi Izin Keberadaan Ormas/LSM	Kominfo	75 -100 Jt
	BKPSDM	SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kabupaten Padang Pariaman	Pihak 3	75 -100 Jt
		E-TPP	Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai secara Elektronik	Internal BKPSDM	75 -100 Jt

		SIASN	Aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah	Pusat	75 -100 Jt
		SIMPEGNAS	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kabupaten Padang Pariaman terpusat	Pusat	0
		MySAPK	Aplikasi berbasis teknologi seluler untuk ASN yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil PNS.	Pusat	0
		SELAIS	Aplikasi pendukung pusat layanan terpadu untuk mempermudah layanan kepegawaian kantor Regional XII BKN	Pusat	0
		SIKAP	Sistem informasi kinerja aparatur di Kab. Padang Pariaman	Internal	101-175 Jt
		I'DIS	Sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin yang terintegrasi dengan SIASN BKN	Pusat	0
		Indeks Implementasi NSPK	Aplikasi untuk penilaian Norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN	Pusat	0
		SiPinter	Untuk Penilaian Sistem Merit Daerah	Pusat	0
		SIJAPTI	Untuk Usulan Pejabat Pimpinan Tinggi	Pusat	0
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Aplikasi Bima	Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian RI	Pusat	0
		Aplikasi Krisna	Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas)	Pusat	0
	BAPELITBANGDA	SIDAK PAPA	Untuk mengimputkan realisasi Indikator Kinerja Utama OPD	Internal	75-100 Jt

		SI RIDA (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai media penyimpanan dan publikasi terhadap dokumen hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman 2. Sebagai media penyimpanan dan publikasi inovasi - inovasi daerah yang diterapkan di Kabupaten Padang Pariaman 3. Sebagai media untuk penyampaian usulan tema penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman 	Internal	75 -100 Jt
		SIMPONI (Sistem Informasi Potensi Ekonomi Nagari)	SIMPONI (Sistem Informasi Potensi Ekonomi Nagari) merupakan aplikasi yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat lokal di Kabupaten Padang Pariaman dalam mengelola sumber daya ekonomi dengan lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Potensi Ekonomi Nagari	Internal	75-100 Jt
		SIPD RI	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan	Pusat	0
	DinsosP3A	Aplikasi SIKS - Next Generation - Kementerian Sosial	<p>Aplikasi yang dikelola oleh KEMENSOS RI</p> <p>Aplikasi Ini memiliki Supervisor di masing-masing Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Nagari</p>	Pusat	0

Disdukcapil	Dukcapil Ceria	Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait di bawah sebuah nama domain, Dukcapil ceria	Internal	75-100 Jt
	Aplikasi Sipakem (Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran dan Kematian)	Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait di bawah sebuah nama domain, Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Internal	75- 100 Jt
	Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Aplikasi IKD yang memudahkan penduduk dalam pelayanan melihat dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil secara digital dalam handphone	Pusat	0
	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIK Terpusat)	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIK Terpusat)	Pusat	0
	Aplikasi Monitoring Pelayanan (PDAK)	aplikasi PDAK monitor pelayanan yang memudahkan melihat banyaknya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil yang dikerjakan	Pusat	0
	Aplikasi Monitoring integrasi Data Kependudukan (M-Sink)	Aplikasi M-Sink monitor pelayanan Integrasi Data Kependudukan yang memudahkan melihat banyaknya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil yang dikerjakan	Pusat	0
	E-OFFICE	Aplikasi E-office mempercepat proses surat-menyurat, Pindah dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil yang up to date	Internal	75-100 Jt
	DWH Web Portal Pemanfaatan Data Kemendagri	Aplikasi DWH monitoring pemanfaatan data kependudukan	Pusat	0

	DISNAKESWAN	Mobile (beta)	Identik PKH Kementan	Pusat	0
		Isikhnas	Aplikasi ini mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesehatan Hewan dan tindakan yang dilakukan	Pusat	0
	RSUD	ASPAK	Aplikasi sarana & Prasarana alat kesehatan	Pusat	0
		SIMRS KHANZA	Aplikasi sistem informasi manajemen Rumah sakit	Internal	75- 100 Jt
	DINKES	Komdat Ditjen Kesmas	Komdat Ditjen Kesmas adalah Komunikasi Data Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Aplikasi ini merupakan aplikasi komunikasi data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aplikasi ini berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi kesehatan secara berkala yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi.	Pusat	0
		SISRUTE	Sistem rujukan terintegrasi merupakan teknologi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan yang lebih rendah ke tingkat layanan yang lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien	Pusat	0
		TELEMEDICINE	Layanan kesehatan berbasis teknologi yang memungkinkan para penggunaannya berkonsultasi dengan dokter tanpa tatap muka (secara jarak jauh)	Pusat	0

		SPGDT PSC 119	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu merupakan sebuah sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri unsur pelayanan pra rumah sakit	Pihak 3	101 -175 Jt
		SIPPAPA	Surat Izin Praktek Padang Pariaman	Internal	75- 100 Jt
	DISPARPORA	PADATI	Aplikasi Mobile Destinasi Wisata	Internal	75 -100 Jt
	DLHPKPP	OSS-RBA	OSS RBA atau Onlinen Single Submission Risk Based merupakan perizinan berusaha berbasis risiko yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha berdasarkan tingkat potensi terjadinya kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya	Pusat	0
		AMDALNET	Sistem informasi dokumen lingkungan hidup berbasis geospasial untuk mendukung percepatan percepatan layanan persetujuan lingkungan bagi para pemrakarsa baik pelaku usaha maupun pemerintah	Pusat	0
		SRN	SRN PPI (Sistem Registri Nasional- Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan nilai ekonomi karbon (NEK) di Indonesia	Pusat	0
		SPECTRUM	Spectrum adalah Sistem Perhitungan Reduksi Emisi GRK secara cepat, Tepat,	Pusat	0

		dan Responsible yang digunakan oleh pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan inisiator lainnya berdasarkan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak		
	SIPSN	SIPSN atau sisten informasi pengelolaan sampah nasional merupakan suatu sistem jejaring yang mengelola data yang bersumber dari beberapa data dasar yang terintegrasi menjadi sebuah kumpulan informasi pengelolaan sampah	Pusat	0
	ONLIMO		Pusat	0
	IKLH	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu	Pusat	0
	e-RTLH	Sistem pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) berbasis elektronik	Pusat	0
	SIBARU	Sistem informasi bantuan perumahan (SIBARU) adalah perwujudan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Direktorat Jenderal Perumahan yang dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata kelola bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung proses bisnis pengelolaan bantuan perumahan mulai dari tahap pengusulan bantuan, monitoring pelaksanaan pembangunan dan sebaran lokasinya, hingga akhirnya bantuan perumahan tersebut dihuni dan/atau	Pusat	0

			diserahterimakan ke calon penerima manfaat.		
BPKD	SIMDA FMIS	Untuk Pengimputan SPJ di OPD baik LS, GU, TU, UP dll.	Pusat	0	
	e-bphtb (elektronifikasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan)	Aplikasi bphtb merupakan aplikasi pajak daerah yang berguna untuk pajak jual beli, waris tanah	Pusat	0	
	SP2D Online	Aplikasi untuk memudahkan penerbitan SP2D	Bank Nagari	0	
	SIPD	Aplikasi sipd merupakan aplikasi penganggaran keuangan daerah	Pusat	0	
	SIM-PBB	Aplikasi ini merupakan aplikasi pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan	Pihak 3	75-100 Jt	
	CEK PBB PAPA	Aplikasi ini bertujuan untuk pengecekan NOP, Nama dan Tunggakan PBB	Pihak 3	75-100 Jt	
Dinas Perikanan	One Data KKP	Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat	0	
DPMD	SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Nagari yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri	Pusat	0	
	PRODESKEL Bina Pemdes (Profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa)	Prodeskel Bina Pemdes adalah sistem informasi yang pengelolaannya oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri.	Pusat	0	
	EPDESKEL	Aplikasi Epdeskel Kemendagri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengisi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna menentukan status tingkat perkembangan desa.	Pusat	0	

		IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.	Pusat	0
		SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa)	Sipades merupakan aplikasi perencanaan administrasi aset desa berbasis Sistem informasi terkait perencanaan, pengadaan, penatausahaan dan penyajian laporan)	Pusat	0
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	WEB SITE KAMPUNG KB	Web Site Kampung KB merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh BKKBN RI yang merupakan aplikasi online pelaporan Kampung KB dengan user nya adalah seluruh Kabupaten/ Kota, dan aplikasi ini bisa diakses setiap orang.	Pusat	0	
	MORENA DAK	Web Site Kampung KB merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh BKKBN RI yang merupakan aplikasi online pelaporan Kampung KB dengan user nya adalah seluruh Kabupaten/ Kota, dan aplikasi ini bisa diakses setiap orang.	Pusat	0	
	ELSIMIL	Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Aplikasi ini diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak stunting. Selain calon pengantin, Elsimil juga ditargetkan untuk kelompok sasaran remaja karena kelak akan menjadi calon pengantin	Pusat	0	
	SIGA	aplikasi sistem informasi keluarga dari BKKBN yang telah mengintegrasikan sistem informasi kependudukan dengan Basis Data Keluarga Indonesia	Pusat	0	

	DINAS	Data KUMKM	Data KUMKM	Pusat	0
	PERDAGANGAN	SINTALA	Sistem Informasi Instruktur dan Tenaga Pelatih	Pusat	0
	TENAGA KERJA	SIAP KERJA	Pendaftaran Peserta Pelatihan	Pusat	0
	KOPERASI DAN	SISNAKER	Pendaftaran Peserta Pelatihan	Pusat	0
	UKM	KARIRHUBD	Data Pencari Kerja, Lowongan Kerja, dan Lainnya	Pusat	0
		SIMPEL	Sebagai Sistem Pelayanan Tera/Tera ulang serta pengawasan metrologi legal	Pusat	0
		SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi	Pusat	0
		SIPR	Sistem Informasi Pasar Rakyat	Pusat	0
		SP2KP	Sistem Pemantauan Pasar kebutuhan pokok	Pusat	0
	BPBD	Aplikasi Call Center 112	Menerima dan merekap telpon masyarakat yang masuk melalui call center 112	Pihak 3	101-175 Jt
		SIMUNAV2 (Sistem Informasi Manajemen V2)	memeberikan infromasi daerah rawan bencana secara cepat, dan tepat terhadap masyarakat dalam bentuk peta berbasis Sistem Informasi Geografis	Pihak 3	75-100 Jt
		Pusdaka	menyampaikan informasi kejadian bencana yang ada di Kab. padang pariaman melalui media website	Pihak 3	75-100 Jt
	Dinas Pendidikan	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)	Untuk Pendataan semua entitas sekolah, mulai dari siswa, guru, tenaga	Pusat	0

			kependidikan, sarana prasarana		
		DAPOBUD (Data Pokok Kebudayaan)	"Untuk Pendataan terkait : 1.Cagar Budaya (CB) dan Objek diduga Cagar Budaya) 2. Data OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan) 3. Lembaga dan Tenaga Budaya 4. Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Pusat	0
	Diskominfo	Lambung Data	Portal Satu Data Pemerintah Daerah	Internal	75-100 Jt
		PPID	Portal Informasi Publik	Internal	75-100 Jt
		Aplikasi Layanan SPBE	Portal Layanan sistem pemerintah berbasis elektronik	Internal	75-100 Jt
	PU PR	e-Paksi	Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (e-Paksi) berbasis online dengan Adroid dan aplikasi ini milik Kementerian PUPR Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID)	Pusat	0
		Web e-Paksi	Webs Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (Webs e-Paksi) berbasis online dan aplikasi ini milik Kementerian PUPR Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID)	Pusat	0
		Krisna DAK	aplikasi e-planning yang terintegrasi oleh 3 (tiga) kementerian yakni, Bappenas, Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan guna mendukung proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan informasi kinerja satuan kerja berbasis online dan aplikasi ini milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Pusat	0

		Emon DAK	sistem pemantauan elektronik (e-monitoring) berbasis online dan aplikasi ini milik Kementerian PUPR Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID)	Pusat	0
		Arcmap atau Qgis	merupakan aplikasi utama yang digunakan dalam ArcGis yang digunakan untuk mengolah (membuat (create), menampilkan (viewing), memilih (query), editing, composing dan publishing) peta	Pusat	0
		SIISD	Sistem Informasi Irigasi Daerah (SIISD) dan aplikasi ini milik Kementerian PUPR Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID)	Pusat	0
		OMSPAN	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) dan aplikasi ini milik Kementerian Keuangan	Pusat	0
	Bag. Organisasi	SIMAK Kinerja (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja)	SIMAK Kinerja (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja) merupakan rangkaian sistem dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi	Internal	75-100 Jt
		ESR (E-SAKIP Reviu)	e-SAKIP REVIU (ESR) adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan	Pusat	0

			Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.		
		SINOVIK (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik)	SINOVIK (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik) merupakan website resmi sebagai digitalisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang dikeluarkan oleh KemenpanRB RI.	Pusat	0
		SIPPN-CARI YANLIK	SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional) merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.	Pusat	0
		PEKPPP	PEKPPP (Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) adalah sebuah platform yang dibuat untuk membantu organisasi dalam melakukan survei dan evaluasi terhadap kinerja dan kepuasan karyawan atau pelanggan. Dengan menggunakan aplikasi ini, organisasi/perangkat daerah (lokus terpilih) dapat dengan mudah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijak dan meningkatkan kualitas pelayanan.	Pusat	0

		SIMONA	SIMONA (Sistem Monitoring Evaluasi Analisis Jabatan) merupakan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan tambahan penghasilan pegawai di pemerintah daerah.	Pusat	0
Bag. Prokopim		SIOLA	SIOLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) merupakan pengembangan aplikasi utama Unit Layanan	Pusat	0
		E-AGENDA	Agenda Perangkat Daerah	Internal	75-100 Jt
	Bag. BPBJ	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital - LKPP yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/PD	Pusat	0
		Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) adalah Aplikasi yang berbasis Website (Web based), berisi daftar dan jadwal Rencana Umum	Pusat	0

			Pengadaan(RUP) seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).		
		Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e- Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital - LKPP yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/PD	Pusat	0

4.5. Rencana Anggaran Arsitektur Infrastruktur

Rencana dan anggaran terbagi menjadi anggaran pengadaan server dan pelengkapannya serta anggaran untuk pengadaan *hardware*. Lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab di bawah ini.

4.5.1. Anggaran Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapannya

Anggaran Jaringan Intra Pemerintah didasarkan pada kebutuhan penggunaan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk 5 tahun kedepan. Detail Kisaran Anggaran ditampilkan pada **Tabel 4.7**

Tabel 4. 7 Rencana Anggaran Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapannya

No	Usulan	Tahun	Target	Harga (Tahun)
1	Bandwidth	2023	800 Mbps (Seluruh OPD)	2 Milyar
		2024	800 Mbps (Seluruh OPD + 10 Sekolah	2 Milyar
		2025	1000 Mbps (Seluruh OPD + 30 Sekolah	2.1 Milyar
		2026	1000 Mbps (Seluruh OPD + 30 Sekolah	2.1 Milyar
		2027	1200 Mbps	2.2 Milyar
2	Perlatan Jaringan Pendukung	2023	Seluruh Perangkat Daerah	60 jt
		2024	Seluruh Perangkat Daerah	60 Jt
		2025	Seluruh Perangkat Daerah	150 Jt
		2026	Seluruh Perangkat Daerah	200 jt
		2027	Seluruh Perangkat Daerah	250 Jt

4.5.2. Anggaran Ruang Server (Data Center) dan Pelengkapannya

Anggaran server didasarkan pada kebutuhan server yang ada di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk 5 tahun kedepan, namun untuk saat ini

ddengan pertimbangan kita memanfaatkan Data Center yang telah disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Pusat Data Nasional, sehingga pembiayaan terhadap pengembangan Data Center Menjadi 0.

4.5.3. Anggaran Perangkat Keras (*Hardware*)

Anggaran *hardware* merupakan kebutuhan perangkat yang digunakan yang terdiri dari rencana anggaran untuk pengadaan printer, PC, Laptop, Printer dan beberapa perangkat keras lainnya dengan berbagai tipe. Kisaran anggaran ini didapatkan dari perbandingan e-katalog dan juga dari web resmi brand tersebut untuk harga dari perangkat *hardware*. Hardware tersebut perlu tetap disisagakan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan terhadap perangkat yang sedang berjalan .perhitungan kebutuhan ketersediaan perangkat pengganti adalah 30 persen dari jumlah Perangkat Daerah.

Kisaran anggaran dapat dilihat pada **Tabel 4.8**

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Modem Advan CPE Start 4G LTE	Secure WPS Encryption + 1 Device 3 SSID, jangkauan sinyal yang lebih luas hingga 125m dengan Router Advan CPE Start, frekuensi 2.4GHz	Rp2,000,000
2	Gateway Router	DHCP, VLAN. CCR2216-1G-12XS-2XQ	Rp41.488.980
3	Gateway Router	Architecture ARM 64bit CPU AL32400 CPU core count 4 CPU nominal frequency 1700 MHz Dimensions 443 x 224 x 44 mm RouterOS license 6 Operating System RouterOS v7 Size of RAM 4 GB Storage size 128 MB Storage type NAND MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature -20°C to 60°C	Rp8.984.500
4	Switch Management Bandwidth	SFP Port, 2Port. CCR2216-1G-12XS-2XQ	Rp41.488.980
5	Distribution switch	VLAN, 1GB,4-SFP, 24port.	Rp7.260.060

		CRS328-24P-4S+RM	
6	Router	Managed, 12Port, VLAN. CCR1016-12S-1S+ (Rp12,099,572) dan CCR1036-12G-4S (Rp16,259,655)	Rp28.359.227
7	Access Point	SKU: UAP-AC-SHD-US 802.11ac Wave 2 WiFi technology 5 GHz (4x4 MU-MIMO) band with a 1.7 Gbps throughput rate 2.4 GHz (4x4 MIMO) band with a 800 Mbps throughput rate Dedicated security radio for persistent network threat management Powered with PoE+* (2) GbE RJ45 ports (1) USB port	Rp8.400.000
8	Antenna Outdoor	Assembled Sleeve30 dimensions 700x700x220mm Box dimensions 720x715x230mm Weight netto 2.95 kg Weight bruto 5.520kg Box contents aluminum shell, front cover, fasteners, silicone sealan	Rp2.249.900
9	Repeater Wifi	Kecepatan maksimal : 300 Mbps Frekuensi : 2.4 GHz Ports : 1 x Ethernet port Fitur : SSID Hiding	Rp307.000
10	MIKROTIK CRS317-1G-16S+RM	RouterBoard CRS317-1G-16S+RM Adalah Switch Layer 3 dari Mikrotik yang berbasis SFP+ (10G). Switch ini Bisa menggunakan SwOS/RouterOS untuk menyesuaikan dengan kebutuhan jaringan 10G Anda. Sudah menggunakan standart Rackmount Case. Spesifikasi CRS317-1G-16S+RM Product Code CRS317-1G-16S+RM Architecture ARM CPU Marvell 98DX8216B0 800MHz Dual Core Current Monitor No Main Storage/NAND 16 MB RAM 1 GB SFP Ports 16 LAN Ports 1 Gigabit Yes Switch Chip 1 MiniPCI 0 Integrated Wireless No MiniPCIe 0 SIM Card Slots No USB No Memory Cards No Power Jack Yes 802.3af Support No POE Input Yes (Ether1) POE Output No Serial Port Yes (RJ45) Voltage Monitor No Temperature Sensor Yes Dimentions 443 x 224 x 44	Rp15.210.000

		mm Operating System RouterOS/SwOS RouterOS License Level6	
--	--	---	--

4.6.Rencana Anggaran Arsitektur Keamanan SPBE

Rencana anggaran Keamanan SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis yang telah dilakukan p**Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman** Informasi kisaran anggaran didapatkan dari beberapa perbandingan *e-commerce*. Penyusunan kebijakan ini menjadi satu kesatuan dengan pengadaan SOP pendukungnya. Kisaran rencana anggaran ini didapatkan dari *benchmark* beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Kisaran anggaran dapat dilihat pada **Tabel 4.9**.

Tabel 4. 9 Rencana Anggaran Keamanan SPBE

No	Perangkat	Spesifikasi	Harga Perperangkat atau Paket
1	Firewall (Fisik))	vSOPHOS XGS 2100 HW Appliance with Base License 3 Years (incl. FW, VPN & Wireless) XG2ATCHUK	Rp86.691.500
		Fortigate Firewall FG 200 F	Rp100.700.000
		Fortinet FORTINET FORTIGATE NEXT-GENERATION F... SYN	Rp 180.000.000"
2.	Akses Masuk (Finger Lock)	ZKTeco F18 (Access Control)	Rp2.371.600
3	Pengadaan Lisensi Firewall	Lisensi Perangkat <i>Firewall</i>	Rp738.457.500
4	Pengadaan SSL	SSL certificate from THAWTE (<i>software</i> 1 tahun)	Rp5.000.000
5	Pengadaan Antivirus Server	Antivirus Kaspersky Small Office Security 10 PC+ 10 Server 1 Year	Rp5.000.000
6	Pengadaan Antivirus	Antivirus Kapersky Small	Rp2.700.000

	Client	Office Security (10 Client + 1 Server) 1 Year	
7	Kebijakan Keamanan Informasi	Konsultan Keamanan Informasi	Rp200.000.000
8	SOP	Pelatihan atau pembekalan untuk SDM dalam rangka meningkatkan Keamanan SPBE	Rp50.000.000 s/d Rp150.000.000

4.7.Rencana Anggaran Audit TIK

Rencana anggaran audit TIK pada sub bab ini didapatkan dari *benchmark* beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Pelaksanaan audit diatur oleh Peraturan Daerah Tentang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kisaran anggaran dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 10 Rencana Anggaran Audit TIK

Audit TIK	Jenis Kegiatan	Kisaran Anggaran
Audit Infrastruktur SPBE	Audit Server	200 – 250 jt
	Audit Jaringan	200 – 250 jt
Audit Aplikasi SPBE	Audit Aplikasi Khusus	200 – 250 jt
Audit Keamanan SPBE	Audit Keamanan Infrastruktur	200 – 250 jt
	Audit Keamanan Aplikasi Khusus	200 – 250 jt

4.8.Rencana Anggaran Peta Rencana Perangkat Daerah (PD)

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Perkiraan Biaya				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Bagian Tatakelola dan Pemerintahan Kerjasama	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp 0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp54.607.000		Rp65.988.000	Rp60.738.000	Rp52.338.000
		Training	Rp279.000	Rp11.384.268	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp9.258.634	Rp11.384. 268	Rp0	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp64.144.634	Rp129.524.268	Rp165.988.000	Rp60.738.000	Rp52.338.000
2	Bagian Hukum	Pembangunan Aplikasi	Rp 0	Rp 0	Rp 75.000.000		
		Pengadaan Perangkat	Rp54.607.000	0	Rp65.988.000	Rp60.738.000	Rp52.338.000
		Training	Rp5.971.134	Rp5.692.134	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp14.950.768	Rp5.692.134	Rp0	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp75.528.902	Rp11.384268	Rp65.988.000	Rp60.728.000	Rp52.338.000
3	Bagian Prokopim	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp 0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp24.157.000	Rp101.340.000	Rp101.340.000	Rp109.740.000	Rp109.740.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp279.000	Rp11.384.268	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp9.258.634	Rp11.384.268	Rp0
Total Anggaran			Rp24.157.000	Rp101.340.000	Rp110.877.634	Rp132.508.536	Rp109.740.000
Rp0	Bagian Administrasi Pembangunan	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp 0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp31.660.000	Rp74.210.000	Rp65.810.000	Rp74.210.000	Rp65.810.000
		Training	Rp0	Rp 0	Rp5,971,134	Rp5.692.134	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp 0	Rp14.950.768	Rp5.682.134	

Total Anggaran			Rp31.660.000	Rp74.210.000	Rp186.731.902	Rp85.574.268	Rp65.810.000
5	Bagian Perekonomian dan SDA	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp 0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp31.660.000	Rp74.210.000	Rp65.810.000	Rp74.210.000	Rp65.810.000
		Training	Rp0	Rp 0	Rp5,971,134	Rp5.692.134	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp 0	Rp14.950.768	Rp5.682.134	
Total Anggaran			Rp31.660.000	Rp74.210.000	Rp186.731.902	Rp85.574.268	Rp65.810.000
6	Bagian LPBJ	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp300.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp292.324.000	Rp167.190.000	Rp211.209.287	Rp167.190.000	Rp167.190.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp13.274.667	Rp12.000.000	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp14.543.776	Rp12.000.000	Rp0
Total Anggaran			Rp292.324.000	Rp167.190.000	Rp539.027.730	Rp191.190.000	Rp167.190.000
7	Bagian Kesra	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp 0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp31.660.000	Rp74.210.000	Rp65.810.000	Rp74.210.000	Rp65.810.000
		Training	Rp0	Rp 0	Rp5,971,134	Rp5.692.134	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp 0	Rp14.950.768	Rp5.682.134	
Total Anggaran			Rp31.660.000	Rp74.210.000	Rp186.731.902	Rp85.574.268	Rp65.810.000
8	Bagian Organisasi	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp 0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp31.660.000	Rp74.210.000	Rp65.810.000	Rp74.210.000	Rp65.810.000
		Training	Rp0	Rp 0	Rp5,971,134	Rp5.692.134	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp 0	Rp14.950.768	Rp5.682.134	Rp0
Total Anggaran			Rp31.660.000	Rp74.210.000	Rp186.731.902	Rp85.574.268	Rp65.810.000

9	Bagian Umum	Pembangunan Aplikasi	Rp 0	Rp 0	Rp 75.000.000		
		Pengadaan Perangkat	Rp54.607.000	0	Rp65.988.000	Rp60.738.000	Rp52.338.000
		Training	Rp 0	Rp 0	Rp5.971.134	Rp5.692.134	Rp5.971.134
		Sertifikasi	Rp 0	Rp 0	Rp14.950.768	Rp5.692.134	Rp0
Total Anggaran			Rp54.607.000	Rp0	Rp161.909.902	Rp72.122.268	Rp58.309.134
10	Bagian Renkeu	Pembangunan Aplikasi	Rp 0	Rp 0	Rp 75.000.000	Rp 0	Rp 0
		Pengadaan Perangkat	Rp54.607.000	0	Rp65.988.000	Rp60.738.000	Rp52.338.000
		Training	Rp5.971.134	Rp5.692.134	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp14.950.768	Rp5.692.134	Rp0	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp75.528.902	Rp11.384.268	Rp140.988.000	Rp60.738.000	Rp52.338.000
11	Diskominfo	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp175.000.000	Rp300.000.000	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp128.813.300	Rp400.908.000	Rp680.405.400	Rp434.102.860	Rp333.984.900
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp750.000.000	Rp750.000.000	Rp750.000.000
		Jaringan	2.000.000.000	2.000.000.000	Rp2.500.000.000	Rp2.500.000.000	Rp3.000.000.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp52.594.935	Rp52.594.935	Rp52.594.935
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp85.795.678	Rp85.795.678	Rp85.795.678
Total Anggaran			Rp2.128.813.300	Rp2.400.908.000	Rp4.243.796.013	Rp4.122.493.472	Rp4.222.375.513
12	Kesbangpol	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp54.607.000	0	Rp65.988.000	Rp60.738.000	Rp52.338.000
		Training	Rp 0	Rp 0	Rp5.971.134	Rp5.692.134	Rp 0
		Sertifikasi	Rp 0	Rp 0	Rp14.950.768	Rp5.692.134	Rp 0

Total Anggaran			Rp54.607.000	Rp0	Rp186.731.902	Rp72.122.268	Rp52.338.000
13	Bapelitbangda	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp 100.000.000	Rp100.000.000	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp297.838.000	Rp151.640.180	Rp152.780.120	Rp158.900.240	Rp135.980.120
		Training	Rp5.971.134	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp14.950.768	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp303.809.134	Rp151.640.180	Rp267.730.888	Rp258.900.240	Rp135.980.120
14	DPUPR	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	Rp0	Rp200.000.000
		Pengadaan Perangkat	Rp174.067.000	Rp181.859.227	Rp166.350.060	Rp194.620.000	Rp252.030.000
		Training	Rp 0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp 0	Rp0	Rp20.642.902	Rp 0	Rp0
Total Anggaran			Rp174.067.000	Rp181.859.227	Rp398.656.230	Rp194.620.000	Rp452.030.000
15	BKPSDM	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	Rp0	Rp200.000.000
		Pengadaan Perangkat	Rp186.397.000	Rp185.467.120	Rp153.840.000	Rp177.900.060	Rp175.720.000
		Training	Rp 0	Rp 0	Rp32.583.402	Rp32.583.402	Rp32.583.402
		Sertifikasi	Rp 0	Rp 0	Rp50.611.236	Rp 0	Rp 0
Total Anggaran			Rp186.397.000	Rp185.467.120	Rp437.034.638	Rp210.483.462	Rp408.303.402
16	BPKD	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp500.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp313.810.000	Rp263.660.060	Rp363.860.120	Rp329.300.060	Rp358.780.120
		Training	Rp0	Rp0	Rp29.765.801	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp9.258.634	Rp32.301.210	Rp0

Total Anggaran			Rp313.810.000	Rp263.660.060	Rp902.884.555	Rp361.601.270	Rp358.780.120
17	Inspektorat	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp375.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp153.840.000	Rp252.388.454	Rp177.119.227	Rp219.128.454	Rp175.720.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp32.044.801	Rp32.044.801	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0		Rp45.090.294	Rp0
Total Anggaran			Rp153.840.000	Rp252.388.454	Rp584.164.028	Rp296.263.549	Rp175.720.000
18	DPPKB	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp317.580.000	Rp340.189.147	Rp305.843.287	Rp288.139.087	Rp232.259.227
		Training	Rp11.663.268	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi					
Total Anggaran			Rp329.243.268	Rp340.189.147	Rp405.843.287	Rp288.139.087	Rp232.259.227
19	DistanKP	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp290.711.000	Rp355.199.227	Rp262.852.060	Rp271.252.060	Rp329.990.000
		Training	Rp5.971.134	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp14.950.768	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp311.632.902	Rp355.199.227	Rp362.852.060	Rp371.252.060	Rp329.990.000
20	Disdukcapil	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp175.000.000	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp795.210.000	Rp234.669.227	Rp270.199.227	Rp350.888.454	Rp267.040.000
		Training	Rp0	Rp20.770.134	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp34.076.928	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp795.210.000	Rp255.439.361	Rp404.276.155	Rp525.888.454	Rp267.040.000

21	Disnakeswan	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp290.711.000	Rp355.199.227	Rp262.852.060	Rp271.252.060	Rp329.990.000
		Training	Rp5.971.134	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp14.950.768	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp311.632.902	Rp355.199.227	Rp362.852.060	Rp371.252.060	Rp329.990.000
22	DPMD	Pembangunan Aplikasi	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp152.860.000	Rp159.277.060	Rp145.610.000	Rp131.960.000	Rp154.010.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp5.971.134	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp14.950.768	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp252.860.000	Rp259.277.060	Rp266.531.902	Rp231.960.000	Rp154.010.000
22	Dishub	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp145.610.000	Rp203.109.287	Rp191.370.000	Rp159.260.000	Rp206.170.000
		Training	Rp12.092.268	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp25.792.902	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp183.495.170	Rp403.109.287	Rp191.370.000	Rp159.260.000	Rp206.170.000
23	DPMPTP	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp161.197.000	Rp254.488.454	Rp151.919.227	Rp175.979.287	Rp162.070.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp161.197.000	Rp254.488.454	Rp384.225.397	Rp175.979.287	Rp162.070.000
24	Setwan	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	Rp0	Rp0

		Pengadaan Perangkat	Rp97.210.000	Rp154.997.000	Rp94.339.227	Rp57.750.000	Rp87.860.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp97.210.000	Rp154.997.000	Rp326.645.397	Rp57.750.000	Rp87.860.000
25	Dinas Perikanan	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp183.417.000	Rp194.879.287	Rp187.619.227	Rp172.910.000	Rp159.260.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp279.000	Rp5.692.134	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp9.258.634	Rp5.692.134	Rp0
Total Anggaran			Rp183.417.000	Rp394.879.287	Rp197.156.861	Rp184.294.268	Rp159.260.000
26	Dinkes	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp255.527.000	Rp332.969.287	Rp343.630.060	Rp326.920.000	Rp391.930.060
		Training	Rp0	Rp0	Rp5.971.134	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp14.950.768	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp255.527.000	Rp332.969.287	Rp464.551.962	Rp426.920.000	Rp391.930.060
27	Disdikbud	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp153.670.000	Rp153.670.000	Rp158.920.000	Rp211.420.000	Rp140.020.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp279.000	Rp11.384.268	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp9.258.634	Rp11.384.268	Rp0
Total Anggaran			Rp153.670.000	Rp153.670.000	Rp268.457.634	Rp234.188.536	Rp140.020.000
28	Dinsos&P3A	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp300.0000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp151.847.000	Rp151.847.000	Rp151.847.000	Rp151.847.000	Rp151.847.000

		Training	Rp0	Rp0	Rp279.000	Rp11.384.268	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp9.258.634	Rp11.384.268	Rp0
Total Anggaran			Rp151.847.000	Rp151.847.000	Rp3.161.384.634	Rp174.615.536	Rp151.847.000
29	Disdagnakerkop&UKM	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp167.830.000	Rp258.500.000	Rp301.568.454	Rp323.618.454	Rp244.850.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp5.692.134	Rp5.692.134	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp5.692.134	Rp5.692.134	Rp0
Total Anggaran			Rp167.830.000	Rp358.500.000	Rp312.952.722	Rp335.002.722	Rp244.850.000
30	Disarpus	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp275.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp147.547.000	Rp154.899.227	Rp123.560.000	Rp96.567.000	Rp123.560.000
		Training	Rp279.000	Rp24.845.667	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi					
Total Anggaran			Rp147.826.000	Rp454.744.894	Rp123.560.000	Rp96.567.000	Rp123.560.000
31	DLHPKPP	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp242.964.000	Rp252.366.960	Rp315.218.454	Rp306.818.454	Rp267.959.227
		Training	Rp5.971.134	Rp5.692.134	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp14.950.768	Rp5.692.134	Rp0	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp248.935.134	Rp363.751.228	Rp315.218.454	Rp306.818.454	Rp267.959.227
32	BPBD	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp300.000.000	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp126.540.000	Rp199.369.952	Rp191.289.287	Rp136.940.000	Rp133.800.060
		Training	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Total Anggaran			Rp126.540.000	Rp199.369.952	Rp291.289.287	Rp436.940.000	Rp133.800.060
35	Kecamatan Enam Lingsung	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
36	Kecamatan 2x11 Enam Lingsung	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
37	Kecamatan Kayutanam	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
38	Kecamatan Nan Sabaris	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
39	Kecamatan Batang	Pembangunan	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp100.000.000

	Anai	Aplikasi					
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp152.330.000
40	Kecamatan Batang Gasan	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
41	Kecamatan V Koto Kp. Dalam	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
42	Kecamatan V Koto Timur	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
43	Kecamatan VII Sungai Sariak	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000

		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
44	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
45	Kecamatan Sungai Geringging	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
46	Kecamatan Ulakan Tapakis	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
47	Kecamatan Lubuk Alung	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000

48	Kecamatan Sintoga	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
49	Kecamatan Patamuan	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
50	Kecamatan Padang Sago	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000
51	Kecamatan Sunai Limau	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat	Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp99.726.227	Rp65.147.060	Rp52.330.000
		Training	Rp0	Rp0	Rp11.663.268	Rp0	Rp0
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp20.642.902	Rp0	Rp0
Total Anggaran			Rp87.860.000	Rp60.730.000	Rp232.032.397	Rp65.147.060	Rp52.330.000

No	Usulan	Spesifikasi	Estimasi Biaya					
	Bandwith	800 Mbps	2023	2024	2025	2026	2027	

BAB 5 Penutup

Dokumen Peta Rencana SPBE Tahun 2022 - 2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi SPBE Kabupaten Padang Pariaman . Peta Rencana SPBE ini disusun dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan SPBE di seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman .

Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Peta Rencana SPBE tahun 2022-2026.
- 2) Peta Rencana SPBE ini dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan mulai 2022 sampai dengan 2026 bagi semua OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman .
- 3) Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Peta Rencana SPBE, masing-masing OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Peta Rencana SPBE dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Pemkab Padang Pariaman tahun 2022 – 2026. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perundangan tentang perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peta Rencana PBE dengan mengacu pada peraturan perundangan yang baru.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR